



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**TINJAUAN GELAR SATUAN KAVALERI TNI AD
DI PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA
SEBAGAI PENDUKUNG STRATEGI PENANGKALAN
DALAM RANGKA KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA**

(Studi Penempatan *Main Battle Tank* Leopard)

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister dalam ilmu Pertahanan**

Oleh

**UDIYANTO
NPM : 120120104042**

**SEKOLAH STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER**

**JAKARTA
FEBRUARI 2014**

Universitas Pertahanan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Indonesia dalam perspektif Wawasan Nusantara merupakan negara kepulauan dengan memiliki 13.466 pulau¹ yang diantaranya terdapat 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Indonesia memiliki perbatasan darat langsung dengan negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Wilayah perbatasan negara, khususnya daratan di Kalimantan Barat rentan terhadap pelanggaran maupun eskalasi gangguan yang memiliki tendensi potensi terhadap kondusifitas pertahanan dan keamanan negara.

Merujuk pada Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional 2010-2014) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Masalah perbatasan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik internasional, regional maupun nasional. Dalam era globalisasi, dunia makin terorganisasi dan makin tergantung satu sama lain serta saling membutuhkan. Konsep saling keterkaitan dan ketergantungan (*interdepedensi*) dalam masyarakat internasional berpengaruh dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan². Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, Pertahanan Keamanan Nasional, serta meningkatkan kesejahteraan

¹ Sumber Panitia Nasional Penamaan unsur-unsur Rupabumi, th 2012, hal 13

²strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, Jakarta Kemenneg Pembangunan Daerah Tertinggal, 2012, hal 7

rakyat diwilayah perbatasan³. Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang baru terbentuk, berperan sebagai Badan yang mengatur tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan⁴.

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas⁵. Pandangan dimasa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan⁶. Masalah perbatasan yang rentan terhadap timbulnya sengketa antar negara dan mengancam keutuhan serta kedaulatan NKRI, antara lain adalah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Propinsi Kalimantan Barat.⁷

³ Tuiman Fatchurrohman Nur, Strategi pengembangan wilayah Perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI dari berbagai dimensi, Th 2011, hal 24

⁴Seminar dan Pelatihan Resolusi Konflik, Kementerian Dalam Negeri, Jogjakarta 10 Juni 2011.

⁵Ibid, Tuiman Fatchurrohman Nur, hal 17

⁶ Carut marut Pembangunan Kawasan Perbatasan (Kalimantan-Serawak), Rusnawir Hamid, Th 2011, hal 27

⁷Mickael Andjioe, 2011, Pengelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, [http: //www.perbatasan .com](http://www.perbatasan.com)



Gambar 1.1 : Wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.⁸

Wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan membentang sepanjang ± 2004 Km (mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Barat ± 850 Km). Berdasarkan letak geografis wilayah perbatasan Kalimantan berada antara garis $2^{\circ} 08'$ LU serta $30^{\circ} 05'$ LS serta di antara $108^{\circ} 0'$ BT dan $114^{\circ} 10'$ BT⁹. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

⁸ Seminar Nasional Strategi Penyelesaian Resolusi Konflik Wilayah Perbatasan, Kementerian Dalam Negeri, Jogjakarta 10 Juni 2011, hal 13

⁹ Dittopad, 2010, titik-titik koordinat batas Wilayah RI-Malaysia di Kalimantan dan Permasalahannya, hal 12

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.¹⁰

Bangsa Indonesia dalam menyusun strategi pertahanan negara, sesuai Buku Putih Pertahanan Negara, bahwa: *“Terselenggaranya pertahanan negara untuk menangkal segala bentuk ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan seluruh Bangsa Indonesia”*.¹¹ Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkal bangsa yang handal¹². Hal ini sejalan dengan adagium Latin yaitu *“Sivis pacem, parra bellum”* (Jika Kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang) Tidak diketahui siapa yang menciptakan peribahasa ini, tetapi banyak yang meyakini bahwa peribahasa ini dikutip dari penulis militer Romawi Publius Flavius Vegetius Renatus: *Igitur qui desiderat pacem, praeparat bellum*. Ide pokok peribahasa ini sudah ditemukan pada Undang-undang VIII (Nouoi 4) Plato 347 SM dan Epaminondas 5 Cornelius Nepos.

¹⁰ Hadi Wijoyo, Pendekatan Sistem dan Tata Ruang Pembangunan Wilayah Perbatasan, Th 2009, hal 128

¹¹Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2010, Kemhan RI hal 48

¹²Ibid, hal 26

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dan berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI juga berfungsi sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan¹³. Konsepsi Pertahanan dan Gelar Kekuatan TNI AD dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Sesuai Undang-undang No. 3 tahun 2002, maka Sistem Pertahanan Negara yang diterapkan pada NKRI adalah Sistem Pertahanan Semesta. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa sejak kelahirannya, TNI-AD tidak didesain untuk mempertahankan negara sendirian. Pertahanan negara akan berfungsi jika totalitas komponen pertahanan negara terwujud¹⁴. Untuk itu Kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai prasyarat penyelenggaraan pertahanan negara di darat, menjadi sangat penting.¹⁵ Sistem pertahanan semesta mengandung pengertian bahwa sistem pertahanan yang kita anut melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan serta berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Untuk itu maka kebijakan pertahanan negara disusun meliputi kebijakan pembangunan dan kebijakan penggunaan kekuatan pertahanan¹⁶.

Penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait proses *nation state building*

¹³ Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Pasal 6

¹⁴ Doktrin, Kartia Eka Paksi, keputusan Kasad nomor: 13/XI/2013 Tanggal 26 November 2013, Hal 43.

¹⁵ Ibid, Hal 5

¹⁶ Ibid, Strategi Pertahanan Negara, Tahun 2010, hal 29

terhadap kemunculan potensi konflik internal disuatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (*neighborhood countries*) khususnya perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Propinsi Kalimantan Barat, yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan di antara kedua negara¹⁷. Berdasarkan isu strategis dalam pengelolaan daerah perbatasan negara selama ini, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang menonjol di daerah perbatasan sebagai berikut: a) Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut maupun darat. b) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitasnya. c) Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti Penyelundupan kayu/*illegal lodging*, tenaga kerja dan lain-lain. d) Pengelolaan perbatasan belum optimal, meliputi kelembagaan, kewenangan maupun program eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil hutan dan kekayaan laut. e) Mental dan professional aparat (*stake holders*) di pusat dan daerah serta aparat keamanan di pos perbatasan.¹⁸

Kondisi yang ada saat ini, untuk menjaga kedaulatan negara, di wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Kodam XII/Tpr menggelar sejumlah 18 pos pengamanan perbatasan, dengan fasilitas dan prasarana yang jauh dari memadai¹⁹. Disamping pasukan yang ditugaskan dalam Pos-pos pengamanan perbatasan, juga ditempatkan satuan Kavaleri yang bersifat permanen yaitu Denkav 2/Kodam XII/Tpr yang berkedudukan di Pontianak Propinsi Kalimantan Barat. Satuan Kavaleri tersebut dilengkapi dengan Kendaraan Tempur (*Ranpur*) type Ringan (*light Tank*) dengan berat kurang dari 20 ton. Ranpur tersebut terdiri dari Ranpur beroda rantai, yaitu Tank AMX 13 buatan Perancis tahun 60 an dan Ranpur beroda ban, yaitu Panser

¹⁷ Kemenko Polhukam, Pertahanan dan Keamanan di daerah Perbatasan sebuah tealaahan kritis, November 2003, hal 23

¹⁸ Ibid, Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI, Tahun 2011, hal 14

¹⁹ Mayjen TNI Subekti, Pangdam VI/MIw, "Majalah Taktik dan Strategi", terbit 12 Juni 2012, hal 34

Saladin dan Panser Saracen buatan negara Inggris tahun 60 an serta Kendaraan Tempur yang baru buatan Indonesia yaitu Panser Anoa.

Menurut Pangdam Mulawarman Mayjen TNI Subekti (Saat itu Kalimantan Barat masih berada dibawah Kodam VI/Mulawarman dan belum terbentuk Kodam XII/Tanjung Pura), disampaikan bahwa kondisi Kendaraan Tempur tersebut sudah ketinggalan zaman, bila dibandingkan langsung tank Malaysia. Dalam kategori strategi militer, Tank TNI sudah dianggap tidak ada, saking tuanya,” katanya²⁰.

Saat ini di perbatasan Indonesia-Malaysia, sudah berjajar tank-tank jenis PT-91 Twardy buatan Polandia yang beratnya hingga 50 ton. Tank-tank milik Malaysia ini memang dipersiapkan untuk pengamanan perbatasan di sepanjang Kalimantan. “Tank-tank Malaysia sudah siap di perbatasan Kalimantan. Bukan hanya itu, Malaysia juga membangun infrastruktur jalan penghubung di wilayahnya sendiri untuk memudahkan pergerakan pasukan dari satu tempat ke tempat lainnya,” Kata Pangdam VI/Mlw.



Gambar 1.2 Tank PT 91 Twardy Malaysia buatan Polandia, berat 50 ton.

²⁰Ibid, hal 35

Sesuai dengan konsep Renstra Hanneg Kodam XII/Tpr tahun 2009-2014, bahwa untuk memberdayakan daerah pertahanan khususnya wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Propinsi Kalimantan Barat, perlu adanya penataan ulang gelar kekuatan satuan di jajaran Kodam khususnya pengembangan Satbanpur²¹ termasuk didalamnya satuan Kavaleri TNI AD. Penataan ulang dilaksanakan dengan rencana pembentukan Batalyon Kavaleri di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan Renstra tersebut maka Pussenkav Kodiklat TNI AD selaku Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT) kecabangan Kavaleri melaksanakan Kajian Akademik tentang rencana pembentukan Yonkav di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Propinsi Kalimantan Barat yang harus sudah terealisasi pada tahun 2014²². Hasil kajian tersebut adalah redistribusi Batalyon Kavaleri 12 di Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat, masuk wilayah Kodam XII/Tpr dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pertahanan secara mendalam, sehingga akan memiliki kemampuan sebagai penindak awal dalam mendukung satuan tempur saat melaksanakan tugas pokok Pertahanan Negara (Hanneg) di wilayah.

Kesiapan operasional Ranpur sebagai Alat Utama Sistem Kesenjataan (*Alutsista*) Satuan Kavaleri merupakan tuntutan mutlak bagi kesiapan Satuan Kavaleri agar dapat melaksanakan tugas pokok satuan maupun kompleksitas tugas yang harus dihadapi serta kesiapan satuan dalam pengerahan operasional²³. Kondisi Ranpur Satuan Kavaleri TNI AD pada saat ini secara umum sangat memprihatinkan dengan berbagai varian dan tahun produksi yang bervariasi. Ranpur yang dimiliki oleh satuan kavaleri sebagian besar buatan tahun 1960 an (Panser Saladin, Saracen, Ferret, V 150,

²¹Renstra Hanneg Kodam VI/Tpr Tahun 2009-2014, Hal 14

²²Kajian akademik Pussenkav Kodiklat TNI AD tentang pembentukan Yonkav 12 &13, tahun 2011, hal 13

²³ Purwadi Mukson, Danpussenkav Kodiklat TNI AD, Seminar Menyongsong Kavaleri Era Baru, Bandung 7 Februari 2013,hal 12

Comando Scout, Comando Ranger dan Tank AMX 13), hanya sebaian kecil yang buatan tahun 1990 keatas (Tank Scorpion, Panzer Tarantula dan Panzer Anoa).²⁴. Hal ini menunjukkan bahwa Ranpur yang ada diasumsikan sudah tdak bisa secara optimal mendukung Satuan Kavaleri TNI AD dalam menjalankan tugas pokoknya.

Kebijakan pemerintah dalam sistem moderniasi Alut Sista TNI diantaranya pengadaan Ranpur jenis MBT diharapkan kedepan dapat memberikan peningkatan pencitraan wibawa Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna membangun Daya Tangkal/*Deterrent Effect*, perbandingan daya tempur relatif yang lebih baik dengan negara tetangga, dan meningkatkan Posisi Tawar/*Bargaining Position* negara Indonesia di dunia Internasional serta khususnya sebagai perimbangan kekuatan terhadap kekuatan satuan kavaleri negara-negara tetangga²⁵.



Gambar 1.3 MBT Leopard

²⁴Ibid, hal 14

²⁵Andy Wijayanto, Konsep Streategi Militer 50 Tahun kedepn, Seminar HUT Kavad, Bandung 7 Februari 2013, hal 16

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah tinjauan gelar satuan kavaleri TNI AD di perbatasan darat Indonesia-Malaysia sebagai pendukung strategi penangkalan dalam rangka kebijakan pertahanan negara, melalui Study tentang penempatan *Main Battle Tank* (MBT) jenis Leopard yang akan dimiliki oleh Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah.

Penelitian ini akan membahas tentang tinjauan gelar satuan kavaleri TNI AD di perbatasan darat Indonesia-Malaysia sebagai pendukung strategi penangkalan dalam rangka kebijakan pertahanan negara, agar masalah-masalah perbatasan dapat direduksi. Proses analisis penelitian ini mengetengahkan aspek pertimbangan penempatan kendaraan tempur *Main Battle Tank* (MBT) Leopard yang akan dimiliki Indonesia, sebagai salah satu jawaban kebutuhan untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seperti apa Ranpur Kavaleri TNI AD yang di butuhkan di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat?
2. Bagaimana kemampuan Ranpur Kavaleri TNI AD yang di butuhkan di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat?
3. Dimana gelar satuan Kavaleri TNI AD yang di harapkan di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Menganalisa efektifitas secara teoritis apakah satuan Kavaleri TNI AD yang ada saat ini, sudah efektif di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat.
2. Menganalisa kebutuhan Ranpur Kavaleri TNI AD di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat.
3. Mengkaji dimana gelar satuan Kavaleri TNI AD yang di harapkan di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara akademis, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan tentang konsep desain satuan kavaleri TNI AD dan penempatan MBT Leopard di perbatasan darat Indonesia-Malaysia dalam rangka pengembangan ilmu pertahanan.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi Pimpinan TNI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat tentang penyiapan Pangkalan dan infrastuktur yang memadai.

1.5 Pembatasan Masalah.

Kompleksitas permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat khususnya berkenaan dengan pertahan keamanan adalah sangat luas di atasi dihadapkan pada kebutuhan pembinaan wilayah pertahanan di wilayah perbatasan darat. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan pembatasan masalah penelitian, maka sesuai dengan judul penelitian ini, telah dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Wilayah penelitian di daerah Mempawah Propinsi Kalimantan Barat yang akan dijadikan sebagai *Home Base* Batalyon Kavaleri 12 Kodam XII/Tpr.
2. Pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia dibatasi pada peran satuan Kavaleri TNI AD di perbatasan Kalimantan Barat.
3. Waktu Penelitian: Periode 1Mei 2013 – 31Oktober 2013

1.6 Sistematika Penulisan

Ruang lingkup penelitian di batasi pada penempatan MBT Leopard, di perbatasan darat Indonesia-Malaysia, dikaitkan dengan rencana pembentukan Batalyon Kavaleri 12 di Mempawah Propinsi Kalimantan Barat, Kodam XII/Tpr, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1 BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pembatasan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

1.6.2 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai pedoman penelitian atau pembuktian yang terkait dengan tesis tersebut (Diantaranya; Teori Strategi, Teori Pertahanan, Teori Perang Semesta, Teori Kedaulatan, Teori Perbatasan, gelar satuanKavaleri, penangkalan, *Main Battle Tank* (MBT)dan Teori Organisasi) serta Pembahasan Tulisan Terdahulu. Sebagai akhir penulisan BAB 2 akan di sajikan tentang Kerangka Pemikiran.

1.6.3 BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Sumber Data/Objek Penelitian, Desain Penelitian, Prosedur Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Rencana Keabsahan Data serta Lokasi dan Waktu Penelitian.

1.6.4 BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisa dari data-data yang diperoleh tentang kesiapan Pemda dari aspek infrastruktur dan prasarana lainnya, apakah satuan kavaleri yang ada sekarang sudah efektif, bagaimana gelar satuan, berapa kekuatannya dan bagaimana kemampuan yang diharapkan dihadapkan pada kondisi geografi Kalimantan Barat.

1.6.5 BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan tesis dari hasil analisis keseluruhan data pada penelitian tersebut dan saran kepada Pimpinan TNI AD, Pimpinan TNI dan Pemerintah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Strategi

Kata strategi berasal dari kata "*strategos*" dalam bahasa Yunani kuno, yang secara harfiah berarti "pemimpin pasukan". Strategi dalam pengertian ini adalah seni menjadi jenderal, mengomandani keseluruhan upaya perang, memutuskan formasi apa yang digunakan, harus bertempur di medan apa, harus menggunakan manuver apa untuk meraih keunggulan. Selain itu, dengan berkembangnya pengetahuan ini para pemimpin militer menemukan bahwa semakin mereka berfikir dan membuat rencana di depan, semakin besar kemungkinan mereka sukses.²⁶ Jauh sebelum abad ke-19 kemenangan perang banyak tergantung pada para panglima perang yang ulung. Alexander Agung dapat merebut wilayah antara Yunani dan India (antara 334 dan 323 SM), Hanibal memperoleh kemenangan atas tentara Roma dalam perang Punic II (antara 218 dan 201 SM). Julius Caesar dapat kemenangan berturut-turut di medan perang dari wilayah Inggris sampai ke wilayah Asia Kecil dan sebagian Eropa (45 sampai dengan 44 SM). Gengis Khan dapat merebut dan menguasai sebagian besar wilayah Asia dan sebagian Benua Eropa (1177-1227). Napoleon Bonaparte menguasai bagian terbesar Eropa (antara 1796-1812)²⁷. Pada saat itu pengertian strategi ruang lingkupnya masih sempit, terbatas pada kalangan militer saja dimana kekerasan senjata digunakan dalam penyelesaian konflik.

Walaupun kata "*strategi*" itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, konsep strategi muncul dalam segala kebudayaan, dalam segala

²⁶Greene Robert, 33 Strategi Perang (The 33 Strategies Of War), Karisma Publishing Group, 2007, hal 26

²⁷Suryohadiprojo, Sayidiman, Suatu Pengantar dalam Ilmu Perang, Masalah Pertahanan Negara, PT Intermasa, Jakarta, 1981, hal 47

zaman. Prinsip-prinsip mantap tentang tata cara menangani kemungkinan perang yang tak terelakkan, cara menyusun rencana paling hakiki, cara mengorganisasikan pasukan dengan sebaik mungkin, semuanya itu dapat ditemukan dalam buku "*manual*" perang mulai dari Cina zaman dahulu hingga Eropa moderen²⁸.

Marsekal Sokolovsky mengemukakan bahwa teori dan seni militer seperti yang diaplikasikan pada operasi militer dalam pelbagai lingkup terbagai dalam strategi, operasi dan taktik. Di dunia barat strategi berada di antara kebijaksanaan (*policy*) dan taktik. Pada strategi para pemimpin militer merencanakan dan menentukan operasi-operasi militer dalam rangka dan lingkup kebijaksanaan penyelenggaraan perang, sedangkan taktik mempermasalahkan metoda pertempuran yang diterapkan²⁹.

Menurut Napoleon strategi adalah taktik besar. Manuver adalah menggerakkan pasukan dan medan tempur ke suatu medan tempur lain, dalam rangka memaksa musuh untuk bertempur³⁰.

Seorang pemikir perang lainnya, Liddle Hart berpendapat strategi berarti seni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kebijaksanaan politik. Di sini jelas bahwa politik mengendalikan strategi³¹.

Menurut Andre Beaufre (1963) seorang Jenderal Perancis, Barat salah beramsumsi bahwa strategi militer adalah satu-satunya strategi (dan kekuatan militer merupakan kekuatan yang paling penting) dan karena strategi militer ternyata sering gagal, Barat telah "mempensiunkan" seluruh seni strategi ke dalam rak museum. Oleh karena itu, Beaufre menyusun suatu "*algebra*" perang moderen yang mencakup strategi militer klasik, strategi nuklir serta strategi tidak

²⁸Suryohadioprojo, Sayidiman, Membangun Pertahanan Negara yang Moderendan Efektif. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 39.

²⁹Ibid, Greene Robert, hal 159

³⁰Ibid, Greene Robert, hal 166.

³¹Britton, Peter, Profesionalisme dan Ideologi Militer, PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996, hal 134

langsung (*indirect*), diuji strategi-strategi tersebut sebagai konsep-konsep abstrak dari serangan (*attack*), pendadakan (*surprise*), muslihat (*deception*) serta memperlihatkan cara dan kapan mereka dapat dipakai secara paling efektif guna mencapai tujuan-tujuan khusus dalam konflik global³².

Bila di suatu masa di mana senjata nuklir memaksakan pembatasan dalam penggunaan kekuatan militer, maka aspek-aspek strategi lain yang harus tampil ke depan. Menurut Beaufre, strategi tidak langsung (*indirect*) adalah strategi masa depan, termasuk mendorong suatu musuh ke dalam pertandingan teknologi yang di luar kemampuannya. Menurut Helmuth Von Moltke (1800-1891), strategi lebih dari sekedar ilmu pengetahuan; strategi adalah penerapan ilmu pengetahuan terhadap kehidupan praktis, pengembangan pemikiran yang mampu memodifikasi ide pemadu semula menurut situasi yang selamanya berubah-ubah; strategi adalah seni bertindak dibawah tekanan kondisi-kondisi yang sulit³³.

Menurut Diktum Clausewitzian bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Diktum Clausewitzian dipakai sebagai strategi pertahanan hampir oleh seluruh negara di dunia³⁴.

Menurut Kusnanto Anggoro pengamat politik dan militer, peneliti senior pada *Centre For Strategic and International Studies* (CSIS), dalam tulisan *Istana, Cilangkap dan Senayan* , menyatakan bahwa peran TNI dalam kehidupan bangsa dalam keadaan apapun hubungan antara TNI dan Politik terpengaruh oleh Diktum Clausewitzian. Menurut Anggoro, Khususnya di lingkungan TNI

³²Suwondo, Purbo S. Kumpulan Butir-Butir Strategi Andre Beufre, Universitas Indonesia, Jakarta, Maret 1999, hal 47

³³Ibid, Suryohadiprojo, Sayidiman, hal 197.

³⁴Clausewitz, Carl *On War* – 1832, diterjemahkan dalam bahasa Jerman oleh O.J. Matthijs Jolles, Washington D.C., Infantry Journal Press, 1950, hal 123

Angkatan Darat, sangat kuat tertanam Diktum Clausewitzian bahwa “ Perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain “³⁵.

Clausewitz mendefinisikan strategi sebagai penggunaan pertempuran untuk mendapat tujuan akhir dari perang, Clausewitz membedakannya dengan taktik yang berarti seni untuk mempergunakan pasukan-pasukan dalam pertempuran. Clausewitz percaya bahwa pertempuran adalah segalanya, dan menaklukkan angkatan perang musuh merupakan tujuan yang tepat dan merupakan jalan menuju kemenangan. Clausewitz menganut teori pendekatan langsung, yakni pendekatan yang menekankan bahwa kemenangan hanya dapat diwujudkan dengan membuat musuh tidak berdaya, menghancurkan kekuatan militernya, merebut negerinya dan menaklukkan kemauannya untuk melawan, dan ini hanya dapat dicapai melalui pertempuran.

Menurut Clausewitz dalam peperangan ada tiga tindakan timbal balik yang menuju ekstrim, yakni³⁶ :

1. Tindakan yang timbul dari semangat eskalasi di masing-masing pihak yang berperang berusaha menggunakan tindakan kekerasan atau kekuatan yang lebih besar dari pihak yang lain.
2. Tindakan yang timbul dari kenyataan bahwa apabila kita tidak mengalahkan lawan, maka terdapat kemungkinan bahwa lawan akan mengalahkan kita. Oleh karena itu lawan harus sama sekali dikalahkan.
3. Tindakan yang timbul dari upaya dan penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperang.

Masing-masing pihak itu akan menggunakan sumber daya masing-masing semaksimal mungkin. Clausewitz, tidak sependapat

³⁵Anggoro, Kusnanto, pengamat politik dan militer, peneliti senior pada Centre For Strategic and International Studies (CSIS), Istana, Cilangkap dan Senayan , Jakarta, Mei 2003, hal 159

³⁶Ibid, Clausewitz, hal 63.

dengan mereka yang berpendapat bahwa musuh bisa dilucuti dan ditaklukan tanpa pertumpahan darah yang besar.

Teori Strategi menurut Sun Tzu. Sun Tzu menuangkan semua pengetahuannya tentang berperang yang diperoleh dari ayahnya maupun pengalamannya sendiri selama bertahun-tahun. Dalam bukunya *The Art of War* (Seni Berperang), mengajarkan: *Kenali kekuatan diri, Kenali kekuatan lawan, janganlah berperang kecuali Anda pasti menang*. Sun Tzu memang diingat orang bukan sekedar karena kemenangan-kemenangannya di medan perang, tetapi pada kecerdikannya dalam memahami sifat –sifat manusia yang tengah terlibat konflik. Ia memilih menggunakan *cunning* (*cerdik yang licik*) dari pada kekerasan, dan bukan hanya saat perang tetapi juga berdagang, diplomasi dan kegiatan lain saat damai³⁷.

Pengertian strategi menjadi berkembang sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Pengguna kata strategis menjadi sangat longgar sehingga mengundang interpretasi yang sangat luas sehingga istilah perang menjadi identik dengan konflik di segala bidang, tidak terbatas pada bidang militer saja. Peranan faktor non militer menjadi luas dan perang menjadi terlalu penting untuk diserahkan semata-mata kepada para jenderal³⁸. Para pakar sependapat bahwa strategi bertingkat-tingkat, mulai dari Strategi Nasional, Strategi Raya (*grand strategy*), sampai strategi pada tingkat operasional. Menurut Lemhannas (Tahun 1989) adalah gambaran tentang perkembangan pengertian istilah strategi, yaitu³⁹:

1. Strategi Militer (strategi murni) adalah penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang militer (penggunaan kekerasan bersenjata).

³⁷Prabowo JS, Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta, Pusat Pengkajiandan strategi Nasional(PPSN), Jakarta, 2012, hal 39

³⁸Bagyo, Hary, Perang Abad-21 dan Sishankamrata (Sistem Pertahanan Rakyat Semesta), PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman(YKPBS), 1996, hal 134

³⁹Lemhanas: Tolok Ukur Kondisi Ketahanan Nasional, 1989, Jakarta, PT Aries Lima.hal 48

2. Strategi Raya mencakup strategi militer dan strategi non militer untuk usaha perang (perang militer). Tujuan strategi raya adalah menang perang dan juga berarti damai yang lebih baik. Lingkungan tidak lepas dari masalah keamanan nasional atau kelangsungan hidup bangsa.
3. Strategi Nasional (*integral*) mencakup strategi raya dan strategi untuk upaya pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

Strategi pada setiap tingkat memiliki tiga unsur atau element yaitu tujuan (*end*), sarana (*means*) dan cara (*ways*) sehingga strategi bisa diartikan sebagai tujuan ditambah cara ditambah sarana.

Para pakar mengembangkan strategi dalam berbagai ujud abstrak sedangkan para perencana nasional birokrat dan para perwira militer mengembangkan strategi secara kongkrit. Maka muncul pemikiran-pemikiran strategi yang berkembang dan dapat merupakan thesa dan anti thesa. Matrik dan pemikiran-pemikiran tersebut dapat menghasilkan berbagai “pilihan strategi” (*choissen*). Collins menyebut adanya beberapa pendekatan dasar seperti⁴⁰:

1. Strategi Berurutan (*sequential*) atau Strategi Kumulatif
2. Strategi Langsung atau Strategi Tidak Langsung
3. Strategi Imbangan Kekuatan atau Strategi Imbangan Nilai
4. Strategi Penangkalan atau Strategi Pertempuran.

“Di dunia dimana banyak orang ragu mengambil keputusan dan terlalu berhati-hati, menggunakan kecepatan akan membawa kuasa yang tak terkira. Memukul lebih dahulu, sebelum lawan anda sempat berfikir atau mempersiapkan diri, akan menjadikan mereka emosional, tidak seimbang dan cenderung membuat kekeliruan”. Demikian bunyi dari strategi serangan kilat, untuk mengatasi perlawanan dengan

⁴⁰Howard, Michael, Clausewitz, Maha Guru Strategi Perang modern, Seri Empu Dunia, PT Grafiti Pers, Jakarta, 1991.hal 36

kecepatan dan gerakan tiba-tiba⁴¹. Strategi ini adalah warisan Sun Tzu, abad keempat sebelum masehi yang berbunyi: Perang itu sedemikian rupa sehingga pertimbangan adalah kecepatan, hal ini untuk memanfaatkan apa yang tak terjangkau oleh musuh, menempuh rute yang paling tidak disangka musuh, dan menyerang kemana ia tidak mengadakan persiapan.

Strategi perang dalam mengendalikan dinamikanya yang disebut strategi memaksa masih diterapkan pada berbagai aspek sampai saat ini. Strategi tersebut dinyatakan sebagai berikut *“Orang terus saja berupaya mengendalikan Anda. Satu-satunya cara agar menang angin adalah menjadikan upaya Anda merebut kendali itu lebih cerdas dan lihai. Dari pada berusaha mendominasi setiap gerakan pihak lawan, coba Anda berupaya mendefinisikan sifat hubungan itu sendiri. Coba anda bermanuver untuk mengendalikan pikiran lawan anda dan menekan tombol emosional mereka serta memaksa mereka membuat kesalahan”*⁴². Strategi tersebut berasal dari strategi menurut Sun Tzu (abad ke empat sebelum masehi) yang berbunyi *“Seorang yang pandai berperang akan memaksa lawannya dan tidak membiarkan diri dipaksa oleh orang lain”*⁴³.

2.1.2 Teori Pertahanan.

Dasar teori pertahanan adalah bagaimana suatu bangsa menjaga keselamatan negara yang bersangkutan dari kemungkinan gangguan, serangan atau bentuk-bentuk lain, untuk turut mendukung pencapaian kepentingan nasional negara yang bersangkutan.⁴⁴ Di abad ke-19 konsep pertahanan hanya membicarakan soal militer, di masa itu gangguan dari luar dianggap semata-mata soal fisik. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh Diktum Clausewitzent.

⁴¹Ibid, Greene Robert, hal 6.

⁴²Ibid, hal 39.

⁴³Adam Roberts, Nations In Armas, The Theory and Practice Of Territorial Defence, St. Martin's Perss, 1986, New York hal 19.

⁴⁴Ibid, Suryohadiprojo, Sayidiman, hal 127

Perkembangan teknologi menyebabkan pandangan tentang pertahanan berubah, pertahanan kemudian dianggap bukan semata-mata hanya soal militer. Perkembangan ini menyebabkan perang juga berubah. Ilmu pertahanan berubah, sebelum 1870, menjalankan perang adalah mengirimkan pasukan militer untuk merebut sasaran, ini merupakan teori Clausewitz, perang adalah tindakan kekerasan untuk memaksa musuh tunduk pada kehendak kita⁴⁵. Di zaman Clausewitz, jelas sekali perbedaan antara damai dan perang pada masa damai digunakan diplomasi, namun ketika diplomasi gagal maka digunakan kekerasan sampai musuh tunduk pada kehendak kita, beralih lagi pada masa damai. Organisasi militer sangat berperan di masa itu.

Kemudian berkembang teknologi yang mengakibatkan perkembangan yang sangat besar pada alat-alat dan senjata militer, misalnya ditemukan mitraliur, sebelumnya ditemukan senapan yang bisa diisi amunisi dari belakang, namun temuan ini belum memperoleh hasil yang revolusioner. Mitraliur merupakan temuan yang revolusioner. Mitraliur menambahkan peluru berkali-kali dalam satu tarikan picu, sehingga membutuhkan mesiu yang banyak dampaknya pada logistik. Suplai logistik mendorong munculnya industri militer untuk memenuhi kebutuhan itu dalam jumlah memadai.

Di zaman yang berkembang, negara bisa mengarahkan tentara sewaan untuk menghadapi musuh. Tentara sewaan membutuhkan banyak uang, maka berdampak pada ekonomi, kerajaan-kerajaan di Eropa berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya untuk membayar tentara. Kebiasaan menyewa pasukan asing berubah ketika Napoleon mengadakan wajib militer yang berhasil mengumpulkan tentara dalam jumlah yang banyak, sehingga bisa membentuk organisasi militer yang besar, yang diberi nama divisi. Besarnya organisasi militer ini menjadi besarnya kebutuhan makanan, pakaian, asrama dan

⁴⁵Ibid, Clausewitz, hal 147.

persenjataan yang menjadi masalah logistik. Di Amerika Serikat terjadi perang saudara (1861-1865) di mana terbukti, kereta api sangat berguna untuk pemindahan pasukan. Dengan kereta pasukan bisa dipindahkan dengan cepat dalam jarak yang jauh dan dalam jumlah yang cukup banyak. Ini merupakan perkembangan besar dari pasukan jalan kaki (infanteri) dan pasukan berkuda (kavaleri)⁴⁶.

Dulu, panglima perang naik kuda karena di atas bukit untuk mengatur perang, memasuki abad ke-20, perang sudah berkembang demikian moderen. Perang Dunia II kapal-kapal selam sudah digunakan oleh Jerman untuk menterpedo kapal-kapal perang musuh dan kapal-kapal non militer. Kapal-kapal non militer diserang untuk memotong logistik pasukan musuh dan daerah jajahannya melalui kapal-kapal non militer.

Perkembangan perang melibatkan non militer karena yang diserang oleh militer bukan hanya sasaran militer. Kemudian muncul teori Johel yang intinya dengan melumpuhkan industri dan masyarakat, tentara yang bertempur di medan perang bukan hanya militer saja⁴⁷.

Dengan demikian pertahanan harus merupakan *national actwork*, tidak mungkin sebuah negara bisa mempertahankan diri jika kondisi politik, ekonomi dan sebagainya tidak memadai, karena ini berpengaruh terhadap kekuatan militernya. Setelah Perang Dunia II, teori Clausewitz tidak digunakan lagi. Di zaman perang Dingin, di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat sama-sama memiliki kekuatan nuklir, tidak mencapai tujuan perdamaian melalui diplomasi, seharusnya setelah diplomasi gagal menurut teori Clausewitz, harus digunakan kekerasan. Clausewitz mengajarkan perang adalah kelanjutan dari politik, artinya dengan perang dicapailah tujuan politik

⁴⁶Ibid, Prabowo JS, hal 25

⁴⁷Ibid, Suryohadiprojo, Sayidiman, hal 141.

suatu negara. Tapi jika Amerika Serikat atau Soviet memulai menembakan nuklir maka akan terjadi kehancuran dunia⁴⁸.

Kemudian militer bukan satu-satunya sarana untuk memaksa lawan tunduk pada kehendak kita, atau jika kekerasan harus digunakan, cenderung digunakan teori Sun Tzu, Jenderal yang baik adalah yang memenangkan peperangan tanpa menggunakan kekerasan. Pertahanan, walaupun titik beratnya masih mengacu pada militer, kini tidak hanya melibatkan elemen-elemen militer. Pertahanan yang baik adalah yang dapat menghidupkan kemampuan untuk *resistence* pada warga negara atau *community*, tidak hanya *resistence* dalam arti fisik, tapi juga *resistence* dalam arti politik dan budaya⁴⁹.

2.1.3 Teori Perang Semesta.

Pengertian secara akademis, perang adalah konflik berskala besar yang terjadi di dalam atau di luar negeri bila terkait dengan masalah kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Semesta dijelaskan dalam Doktrin Pertahanan Negara sebagai pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dari pengertian kata perang dan semesta maka dapat dipahami bahwa perang semesta: (1) Tidak harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara militer, seperti misalnya bertempur dengan menggunakan senjata api; (2) Pelibatan rakyat dalam perang tidak harus dengan mempersenjatai secara fisik dan memperankannya sebagai kekuatan tempur bersenjata atau kombatan; (3) Mengingat ancaman terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia tidak hanya berasal dari kekuatan militer “luar negeri” (*Negara lain*), tetapi juga bisa berasal dari kelompok di dalam negeri (*sparatis*), maka perang

⁴⁸Ibid, Suryohadiprojo, Sayidiman, hal 146.

⁴⁹Ibid, Suwondo, Purbo S, hal 59.

semesta dapat terjadi ketika berhadapan dengan kelompok sparatis.⁵⁰

Dalam Doktrin Pertahanan Negara menjelaskan bahwa; Perang Rakyat Semesta pada hakekatnya “Perang total seluruh rakyat Indonesia dengan mengerahkan segenap kekuatan dan sumber daya nasional untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari bangsa lain yang mengancam atau menduduki wilayah NKRI⁵¹. Perang Rakyat Semesta bersifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan”.

Kerakyatan diwujudkan melalui keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan peran, kemampuan. Profesi dan keahliannya sebagai manifestasi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam bela negara. Kesemestaan diwujudkan melalui pengerahan seluruh kekuatan dan sumber daya nasional Indonesia untuk dapat dimobilisasi guna kepentingan menghadapi bentuk ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Kewilayahan diwujudkan dalam pendayagunaan seluruh wilayah negara sebagai ruang juang dalam mengembangkan strategi pertahanan guna mencapai tujuan.⁵²

Perang Rakyat Semesta bagi Indonesia dewasa ini hakikatnya adalah perang total seluruh rakyat Indonesia, namun tidak berarti seluruh rakyat diperankan sebagai kombatan. Pemahaman ini tentunya tidak sama persis dengan *total war* dalam pengertian universal. Dalam perang semesta perlawanan rakyat yang tidak bersenjata untuk menghadapi ancaman militer suatu negara tidak dimaksudkan untuk menjadikan rakyat sipil sebagai “*tameng hidup*” atau menjadikan seluruh rakyat sebagai kombatan⁵³.

Wujud perlawanan rakyat tidak bersenjata itu dapat berupa reaksi spontan dan menyeluruh dari bangsa Indonesia, untuk

⁵⁰Ibid, Prabowo JS, hal 42

⁵¹Ibid, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta, 2010, Hal 99

⁵²Ibid, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta, Kemhan, 2010, Hal 43

⁵³Ibid, Bagyo, Hary, hal 15.

menentang dan menolak setiap bentuk usaha untuk mengganggu kedaulatan Indonesia, misalnya dapat dilakukan melalui: (1) Diplomasi; (2) Hukum; (3) Unjuk rasa; atau (4) Melalui upaya pembentukan opini di media masa dan media elektronik serta persepsi positif masyarakat dunia dan segenap bangsa Indonesia.⁵⁴

2.1.4 Teori Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan itu meliputi darat, laut dan ruang udara di atasnya, laut teritorial, serta dasar laut dan tanah dibawahnya (Unclos, pasal 2 ayat 2). Berkaitan dengan kedaulatan Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara. Ia juga menyatakan bahwa kedaulatan tersebut mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai: (1) Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain; (2) Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya; (3) Bersifat abadi atau kekal; (4) Tidak dapat dibagi-bagi, karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja; (5) Tidak dapat dipindahtangankan atau diserahkan kepada pihak lain.

Lain dari pada itu Yudha Bakti Ardiwisastra dalam bukunya "*Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*" mengatakan, "Bahwa dalam perkembangannya, pengertian kedaulatan mengalami berbagai perubahan, dimana negara dikatakan berdaulat apabila negara tersebut mampu dan berhak mengatur

⁵⁴Ibid, , Bagyo, Hary, hal 37

sertamengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam negeri dan luar negerinya, dengan tidak bergantung kepada negara lainnya”.⁵⁵

Dalam tulisan yang lain Mochtar Kusmaatmaja menambahkan “Bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, dimana negara tersebut berdaulat, tapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian”.⁵⁶

2.1.5 Teori Perbatasan.

Adapun pengertian batas adalah tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik berupa tanda alamiah maupun buatan.⁵⁷ Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu boundaries dan frontier. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut frontier karena posisinya yang terletak di depan atau di belakang dari suatu negara. Oleh karena itu, *frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland*, *borderland*, ataupun *march*. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. *Boundary* paling tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat.⁵⁸

⁵⁵ Ardiwirastra Yudha Bhakti, Kedaulatan Negara di forum Peradilan, Jakarta 1991, Hal 43

⁵⁶ Moechtar Koesoemaatmaja, Teori Kedaulatan Indonesia, 1982 Hal 15

⁵⁷ Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Permasalahan Pertahanan dan Keamanan di Daerah Perbatasan sebuah telaahan kritis, November 2009 Hal 35

⁵⁸ Ibid, Permasalahan Pertahanan dan Keamanan di Daerah Perbatasan sebuah telaahan kritis, November, 2009, Hal 36-37

Dari Konsep dan teoritis tentang wilayah perbatasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wilayah perbatasan dibedakan dalam dua pengertian yaitu *bouderis* adalah garis-garis yang menghubungkan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara. Sedangkan *rontiers* mewujudkan zona-zona dengan lebar yang beraneka bahwa negara memiliki perbatasan yang terluar dari batas wilayahnya dan diatur pula pada zona-zona yang telah ditentukan antar negara berdasarkan hukum internasional sebagai unit wilayah/tempat (*spatial*) yang berdaulat.
2. Wilayah perbatasan pada Teori *Karl Haushofer* tentang "*Lebensraum*" mengatakan batas wilayah perbatasan merupakan mencari tambahan tempat baru (*Living space*) dengan mencari koloni baru untuk memperluas wilayahnya. Pada Jaman Hitler menerapkan teori ini. Dengan menduduki dan menguasai wilayah-wilayah negara tetangga di Eropa dengan target pertama Austria dan Czechoslovakia. Dengan menerapkan untuk menggabungkan tiga negara menjadi satu merupakan menerapkan *Strategy Frontiers*.⁵⁹
3. Wilayah perbatasan dapat diartikan ruang atau tempat yang dihuni oleh dari suatu populasi/masyarakat yang berada pada satu negara dan melakukan kegiatan atau aktifitas dalam rangka memenuhi kehidupannya. Wilayah yang terpencil memiliki karakteristik khusus jumlah penduduk yang rendah, memiliki 2 mata uang yang berlaku dan kota yang melayani kedua masyarakat. Sebagai negara yang memiliki wilayah tidak akan terlepas memiliki arti tanggung jawab untuk membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keamanan wilayah perbatasan

⁵⁹Daldjoeni, N., *Dasar-Dasar Geografi Politik*, PT Citra Adhya Bhakti, 1991 hal 17.

2.1.6. Postur TNI AD.

2.1.6.1. Pembinaan Pengembangan Kekuatan TNI AD.

Pengorganisasian kekuatan pertahanan harus didasarkan pada konsep pemikiran tertentu. Pengorganisasian kekuatan pertahanan negara yang satu berbeda dari negara yang lain, karena masing-masing memiliki dasar pemikiran yang tidak selalu sama. Dasar pemikiran itu dipengaruhi oleh dasar negara atau pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*). Bagi bangsa Indonesia, dengan dasar negara Pancasila, perang hanya dilakukan kalau diperangi atau diserang bangsa lain.⁶⁰ Postur komponen utama pertahanan negara adalah postur Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang pada dasarnya terdiri dari TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU). Kekuatan TNI sebanyak 413.729 personel, khususnya TNI AD sebanyak 317.273 personel.⁶¹ Pengorganisasian kekuatan TNI AD disusun dalam tiga kategori kekuatan, yakni: (1) Kekuatan terpusat Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus); (2) Kekuatan Kewilayahan; yakni Komando Daerah Militer (Kodam) dan 3 (tiga) kekuatan TNI AD lainnya.⁶²

Penggunaan kekuatan TNI-AD melibatkan kekuatan pertahanan militer secara total dalam bentuk kekuatan penangkalan dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh. Keterpaduan antara fungsi harus serasi dan seimbang sesuai dengan peran fungsi masing-masing. Totalitas pertahanan matra darat berprinsip pada kesemestaan, sehingga sinergitas antar fungsi-fungsi merupakan keutamaan pendayagunaan kekuatan matra darat dalam kerangka pertahanan militer. Selain itu memberikan petunjuk bagi satuan-satuan operasional di lapangan, termasuk di dalamnya

⁶⁰Ibid, Suryohadiprojo, Sayidiman, Hal 249

⁶¹ Dispenad, 25 Juii 2013, hal 13

⁶²Departemen Pertahanan, Doktrin Pertahanan Negara, Jakarta (2007), hal 42-48

tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pembelaan diri (*self defense*) yang memperbolehkan para komandan bertindak sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai atau menyelesaikan tugas-tugasnya di dalam batas-batas kebijaksanaan nasional (*national policy*) yang telah ditetapkan.

2.1.6.2. Pembinaan Pengembangan Gelar TNI AD.

Menurut kamus bahasa Indonesia gelar dapat diartikan menggelar, menghamparkan atau membentangkan.⁶³ Apabila gelar disamakan dengan istilah *deployment* maka berarti menyebarkan.⁶⁴ Dengan mengacu kedua pengertian gelar tersebut, jika di kaitkan dengan gelar kekuatan militer, maka gelar dapat diartikan sebagai pagelaran, penempatan, penyebaran kekuatan militer atau satuan militer (TNI) pada suatu tempat yang ditentukan. Dalam *Theory of War and Strategy "Human Factors in War"* persyaratan gelar kekuatan adalah (1) *when there still lack of; political will and domestic support, or lack of clear ideas of outcome; and (2) Then we settle on the military achieving amelioration or containment.*⁶⁵ Atau (1) Ketika disitu tidak ada niat/keinginan politik, dukungan dalam negeri, atau tidak ada pendapat yang jelas, dan (2) Kami akan berusaha menempatkan pencapaian perkembangan militer pada perbaikan-perbaikan.

Gelar kekuatan pertahanan matra darat ditujukan pada peningkatan kemampuan, kekuatan dan gelar bagi satuan Kostrad dan Kopassus sebagai kekuatan terpusat untuk dapat dimobilisasi ke seluruh wilayah NKRI, sedangkan Kodam sebagai kompartemen strategis harus memiliki daya tangkal yang kuat dengan meningkatkan kemampuan, kekuatan dan gelar satuan sesuai dengan luas wilayah

⁶³Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, Hal 306

⁶⁴Karimuda Ahmad, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Gita Media Press, Surabaya, 2008, Hal 161

⁶⁵Nugroho Riant, *Publik Policy*, PT Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, hal 37

dan ancaman yang mungkin timbul. Dari persyaratan gelar kekuatan tersebut, maka penggelaran kekuatan TNI dilakukan bukan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, harus didukung oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat di daerah setempat dan ditujukan untuk keberhasilan atau kemajuan tugas TNI itu sendiri.

Pada Undang-Undang RI No. 34/2004 tentang TNI Pasal 11 ayat (1) berbunyi: "Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata." Dan ayat (2) berbunyi: "Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara." Pada penjelasan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI.

Pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI tersebut harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan. Dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari betuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.

Kekuatan pertahanan yang telah disusun harus ditentukan penempatannya untuk memberikan manfaat maksimal bagi pertahanan negara. Diusahakan agar semua kesatuan menempati bangunan permanen, seperti Asrama bagi Kesatuan TNI AD. Pangkalan bagi kesatuan TNI AL dan TNI AU.⁶⁶ Berdasarkan pertimbangan terhadap perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan dukungan anggaran yang dapat disediakan oleh negara, penggelaran kekuatan TNI diorientasikan kepada daerah rawan keamanan, daerah rawan pelanggaran perbatasan, daerah rawan

⁶⁶*Ibid*, , Suryohadiprojo, Sayidiman, Hal 266-268

konflik dan pulau terluar. Gelar kekuatan TNI tidak selalu mengikuti gelar struktur organisasi administrasi pemerintahan, tetapi disesuaikan dengan perkiraan kemungkinan timbulnya ancaman, sehingga gelar kekuatan TNI disusun sedemikian rupa agar mampu merespon dengan cepat setiap ancaman yang terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam bentuk kekuatan terpusat dan kekuatan kewilayahan.⁶⁷

2.1.6.3. Pembinaan Pengembangan Kemampuan TNI AD.

Pembinaan kemampuan kekuatan pertahanan matra darat bertujuan untuk menciptakan efek tangkal di darat yang merupakan sinergitas antara pertahanan militer dengan kemampuan pertahanan nirmiliter baik dalam rangka tugas OMP maupun OMSP. Pembinaan SDM merupakan investasi SDM organisasi yang harus direncanakan, dipolakan, didayagunakan, dievaluasi sesuai kompetensi dan kinerja jabatan dan pekerjaan. Keberhasilan investasi ditentukan oleh pemilihan dan penggunaan personel terbaik dalam organisasi. Sehingga pembinaan SDM berpedoman pada prinsip kesukarelaan dalam upaya bela Negara, Jati diri, Nilai-nilai utama, budaya organisasi dan SDM terbaik. Untuk menghasilkan SDM berkualitas, perekrutan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dari sumber terbaik. Hasil perekrutan dilanjutkan dengan pembangunan, pengembangan profesi dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Hasil didik digunakan sesuai dengan analisis jabatan dan pekerjaan berdasarkan syarat kompetensi dan deskripsi pekerjaan dan jabatannya.

Sumberdaya di kelompokkan ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*"⁶⁸. dan ke dalam: "*Human resources, Material resources, Financial resources and Information*

⁶⁷Keputusan Panglima TNI, Nomor Kep/2/1/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia, Tri Darma, Eka Darma (Tridek), Jakarta 2007, Hal 54

⁶⁸Schermerchorn, Jr, Human Resources, tahun 1994, hal 14.

*resources*⁶⁹. Pengelompokan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: “*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*”. Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: “*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*. Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: “*Financial resources- cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc*”. Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: “*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*”.

Sumber daya organisasi terdiri dari : “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*”.⁷⁰Sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan;

“*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed* “.

“Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”⁷¹.

Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktorl yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi.

⁶⁹Hodge, HumanResourceDevelopment, tahun 1996, hal 14.

⁷⁰Edwards III, Organizationing and Staffing, tahun 1980, hal 11

⁷¹Tachjan, Transformasi dalam Organisasi, Jakarta tahun 2006, hal 135.

Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya. Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, :“Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”.⁷²

2.1.7. Penangkalan.

Penangkalan adalah suatu strategi yang bersifat defensif, dalam pengertian bahwa interaksi strategi (*strategic exchanges*) baru berlangsung pada saat dan/atau setelah terjadi serangan pertama (*first-strike*) dari pihak lawan potensial (*detering potential adversaries*). Namun disini penangkalandidefinisikan sebagai kemampuan suatu negara menggunakan ancaman kekuatan militer untuk mencegah negara lain melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, dengan meyakinkannya bahwa biaya yang harus

⁷²Ibid, Edward III, hal 102

ditebusnya jauh lebih besar dibanding peluang keuntungan politik mungkin yang dapat diraihinya.⁷³

2.2. PenelitianTerdahulu.

2.2.1 Penelitian tentang Gelar satuan kekuatan kewilayahan TNI AD dalam mengamankan wilayah perbatasan darat (Studi Kasus di Wilayah Korem-121/Alambhana Wannawai Pada Perspektif Pertahanan Semesta)", pernah dilaksanakan oleh I Made Wijana, mahasiswa SSPS UNHAN tahun 2008. Permasalahan tersebut kemudian diuraikan menjadi tiga pertanyaan penelitian yakni:

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya permasalahan di wilayah perbatasan darat Kalimantan saat ini?
2. Bagaimana pendekatan yang tepat untuk menciptakan stabilitas diwilayah perbatasan dengan negara tetangga?
3. Bagaimana strategi pertahanan di wilayah-wilayah perbatasan tersebut di atas agar dapat menunjang ketahanan nasional?

Pada kesimpulan tulisannya yang terkait dengan perbatasan Indonesia-Malaysia adalah;

1. Faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan di perbatasan, yang memiliki bobot pengaruh paling tinggi adalah faktor budaya, kemudian diikuti faktor ekonomi, faktor geografis, hukum adat, nasionalisme gelar pasukan (militer) bilateral dan hukum nasionalisme.
2. Untuk menciptakan stabilitas wilayah perbatasan dengan negara tetangga dari tiga alternatif pendekatan yang diajukan, sebagian besar responden memilih pendekatan kesejahteraan, pendekatan diplomasi dan pendekatan Militer.

⁷³Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (2002), Sistem Pertahanan Keamanan Negara, hal .219,220.

3. Strategi pertahanan yang tepat adalah strategi yang mengedepankan kerja sama *government to government* dibidang-bidang; seperti ekonomi, budaya, sosial, dan pertahanan.

Walaupun tulisan tersebut dari persepektif yang lain tetapi relevansinya adayıtu pada gelar pasukan (militer) dapat mempengaruhi pada permasalahan yang dihadapi di wilayah perbatasan.

2.2.2. Penelitian tentang “Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara Tahun 2012”, pernah dilaksanakan oleh Idup Suhady, Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara. Permasalahan tersebut kemudian diuraikan menjadi dua pertanyaan penelitian yakni:

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya permasalahan di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat saat ini?
2. Bagaimana strategi pertahanan di wilyah-wilayah perbatasan tersebut dilaksanakan untuk mengurangi permasalahan di atas dalam rangka Ketahanan Nasional?

Pada kesimpulan tulisannya yang terkait dengan perbatasan Indonesia-Malaysia adalah;

1. Faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan di perbatasan, yang memiliki bobot pengaruh paling tinggi adalah faktor petugas/pasukan (militer) yang menempati pos-pos pengaman perbatasan.
2. Untuk menciptakan stabilitas wilayah perbatasan dengan negara tetangga perlu penambahan personel kepolisian untuk mengurangi tindakan kriminalitas di perbatasan.

Walaupun tulisan tersebut dari perspektif yang lain tetapi relevansinya ada yaitu pada perlunya penambahan pasukan

pengamanan dari Kepolisian dapat mempengaruhi pada permasalahan yang dihadapi di wilayah perbatasan.

2.3 Kerangka Pemikiran.

Gelar satuan kavaleri di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Propinsi Kalimantan Barat saat ini belum optimal. Perbatasan darat Indonesia-Malaysia merupakan beranda terdepan, dan rentan terhadap pelanggaran, serta berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Permasalahan di daerah perbatasan yang terjadi, antara lain: :Terjadi kerusakan patok batas dan belum tuntasnya penetapan batas, infrastruktur dasar belum tersusun, kondisi geografi Kalimantan Barat sebagian besar daerah gambut dan sungai yang panjang, penanganan daerah perbatasan belum terpadu, daerah perbatasan adalah daerah tertinggal. Disamping itu adanya isu strategis yang paling menonjol di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia saat ini adalah Malaysia sudah menggelar tank-tank jenis MBT PT-91 Twardy buatan Polandia yang beratnya hingga 50 ton.

Sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional 2010-2014) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional dan Kebijakan pemerintah dalam sistem modernisasi Alut Sista TNI diantaranya pengadaan Ranpur jenis MBT diharapkan kedepan dapat memberikan peningkatan pencitraan wibawa Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna membangun Daya Tangkal/*Deterrent Effect*, perbandingan daya tempur relatif yang lebih baik dengan negara tetangga, dan meningkatkan Posisi Tawar/*Bargaining Position* negara Indonesia di dunia Internasional serta konsep Renstra Haneg Kodam XII/Tpr tahun 2009-2014, diantaranya rencana pembentukan Yonkav di wilayah Kalimantan Barat yaitu Batalyon Kavaleri 12 di Kabupaten

Mempawah, merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak boleh ditawar-tawar. Satuan Kavaleri yang ada saat ini yaitu Denkav 2/Pontianak tidak optimal dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan dan sebagai aspek penangkal/*deterrence*. Dengan demikian, TNI AD membutuhkan Kekuatan Satuan Kavaleri TNI AD yang siap operasional, handal, tangguh, modern dan mampu memberi aspek penangkal/*deterrence*.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sumber Data Penelitian.

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh kenyataan-kenyataan yang berlangsung secara mendalam, data-data secara rinci, dan fakta-fakta secara otentik, terhadap semua hal yang diperlukan dalam penelitian. .Data, fakta, dan informasi yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya disusun dalam bentuk penyajian data.

Berdasarkan uraian diatas, maka metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dipilih penulis merupakan metode yang memberikan gambaran dan uraian secara jelas dan singkat, sistematis dan akurat dalam sebuah penelitian yang mengutamakan kualitas data, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat. Dalam mendapatkan data yang berkualitas, peneliti melakukan tehnik pengumpulan data melalui sumber primer dan sumber sekunder, dilakukan dengan studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini data yang mendukung objek penelitian dari diperoleh dari instansi TNI yang membidangi data tersebut serta dari pejabat yang langsung mensupervisi permasalahan tersebut. Data-data tersebut berupa data utama yaitu data tentang kemampuan teknis MBT (*Main Battle Tank*) jenis Leopard dan gelar satuan Kavaleri di perbatasan Kalimantan Barat.

Data primer yaitu data tentang kondisi strategi pertahanan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang terkini diambil dari data Deninteldam XII/Tpr. Selain itu, juga diperlukan data sekunder yaitu

tentang kesipan daerah dari aspek infrastruktur dan prasarana yang lain yang mendukung Obyek penelitian ini. Penelitian dibatasi pada dua level saja yaitu; level strategis dan level taktis. Level strategis oleh Pangdam XII/Tpr. Level taktis terkait dengan spesifikasi teknis MBT Leopard yaitu Danpusenkav Kodiklat TNI AD.

3.2. Desain Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggiring peneliti dekat dengan subyek-subyeknya dan sensitif terhadap konteks, dan sifat-sifat ini cenderung membuahkan keakuratan yang lebih besar pada kesahihan data kualitatif dibandingkan kuantitatif, yang terlihat sedikit kontras⁷⁴. Beberapa ahli penelitian berpendapat tentang penelitian kualitatif. Menurut Moleong⁷⁵ bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan tujuan penelitian menurut Emzir⁷⁶ adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian, dan seperti apa peristiwa atau aktifitas yang terjadi di latar penelitian. Ditinjau dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian dengan cara menjelaskan suatu fenomena yang terjadi secara sistematis dan terencana yang didasarkan pada teori atau pendapat para ahli.

⁷⁴ Julia Brannen, Memadu Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif hal 90

⁷⁵ Lexy Moleong, (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, Hal. 6

⁷⁶ Emzir, (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif. Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa, Hal. 174

Sejalan dengan pendekatan tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Silalahi dari penelitian deskriptif, terutama bagi ilmu-ilmu sosial, banyak *imponderabilia* (hal-hal yang nampaknya tidak penting, tetapi yang pada hakikatnya sangat berperan seperti nilai-nilai, dan sebagainya) dari kehidupan sosial sehari-hari dapat dideskripsi, yang tidak muncul dalam suatu penelitian eksplanasi. Penelitian deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, *setting* sosial, atau hubungan.⁷⁷ Metode ini akan digunakan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena dan gejala mengenai penilaian masyarakat terhadap penempatan MBT Leopard di Mempawah Propinsi Kalimantan Barat melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat secara sampling dan wawancara kepada pejabat daerah.

Miles dan Huberman (1984) menyatakan, "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Artinya dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁷⁸

Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Moleong, J Lexy (1988), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷⁹

Adapun alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif, untuk menggambarkan Desain penempatan MBT Leopard serta pengaruhnya dalam pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di

⁷⁷Silalahi Uber, Metode Penelitian Sosial, Unpers Perss, Februari 2006, Hal 35

⁷⁸Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode),hal 334.Afabeta, Bandung.

⁷⁹Ibid, Lexy Moleong, (2005),hal: 6.

wilayah provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data awal berupa wawancara di Pussenkav Kodiklat TNI AD, di Kodam XII/Tpr, di Denintel Kodam XII/Tpr, di Denkav 2/Pontianak, di Pemda Kalimantan Barat, di DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan di Pelabuhan Pontianak, observasi lapangan di Pelabuhan Pontianak tempat pendaratan MBT Leopard, di Denkav 2/Pontianak tempat Alut Sistikav yang ada sekarang serta di Mempawah tempat pangkalan Baru Batalyon Kavaleri 12 dan dokumentasi.

3.3. Prosedur Penelitian

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012) mengatakan : “Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara atau tehnik pengumpulan data. Sumber data didapat melalui sumber primer yang langsung memberikan data kepada peneliti berupa wawancara terhadap narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data seperti melalui orang lain atau dokumen”.⁸⁰

Senada dengan pernyataan diatas, tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui *observasi* (pengamatan), *in depth interview* (wawancara mendalam), dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir⁸¹. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti mengatur waktu dan tempat serta personil yang disiapkan sebagai responden sehingga terlaksana

⁸⁰Ibid, Sugiyono. 2012,hal 308.

⁸¹Silalahi Uber, *Metode Penelitian Sosial, Unpers Perss*, Februari 2006, Hal 287

dengan lancar. Wawancara terstruktur (*structured interview*), kadang-kadang disebut wawancara distandarisasi (*standardized interview*), memerlukan administrasi dari suatu jadwal wawancara oleh seorang pewawancara.⁸² Berkaitan dengan ketentuan tersebut, peneliti menyiapkan bahan wawancara berupa pertanyaan yang berhubungan dengan penempatan MBT Leopard, kesiapan Pemerintah Daerah dari aspek infra struktur dan prasarana lainnya, dampak penempatan MBT Leopard di perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka (*personal interview*) dan melalui telepon (*interview* atau *survey*). Wawancara tatap muka dilakukan secara personal antara peneliti (pewawancara) dan responden.⁸³

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen dan arsip yang dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dari satuan kavaleri Denkav 2/Pontianak. Dalam hal ini peneliti mempelajari dokumen "Laporan Pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan" serta buku-buku "Laporan Pelaksanaan Program Kerja Dan Anggaran Bidang Intelijen Kodam XII/Tpr Tahun 2012".

3.3.2. Studi Pustaka

Studi pustaka berkaitan dengan aturan perundangan, kebijakan Pemerintah, beberapa teori yang mendukung tentang desain satuan kavaleri, strategi penangkalan, kemampuan dan batas kemampuan MBT Leopard, pertahanan negara dan Kedaulatan NKRI.

3.3.3. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipatif, dimana peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan observasi pada

⁸²Ibid, hal 288

⁸³Ibid, Hal 290

tanggal 5 sampai dengan 10 Oktober 2013 di Mapusen kav Kodiklat TNI AD di Bandung dan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 di Mempawah dan Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh penulis terhadap obyek yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁸⁴ Melalui observasi partisipatif ini data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, tajam dan sampai pada makna dari materi yang hendak diteliti.

Observasi lapangan digunakan oleh peneliti dalam proses pencatatan pola aksi subjek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung kondisi fisik, sehingga dapat memperoleh gambaran kondisi nyata di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Observasi lebih difokuskan pada kondisi Alut Sista Kavaleri yang ada di Den kav 2/Pontianak, Pelabuhan Lantamal yang ada di Pontianak tempat pendaratan MBT Leopard RI, jalan dan jembatan yang akan dilalui dan pembangunan pangkalan Batalyon Kavaleri 12 di Mempawah Kalimantan Barat yang sudah mencapai 50%.

Melalui observasi, peneliti berharap dapat mengetahui kebenaran pandangan teoritis tentang permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan implementasi di lapangan, serta bagaimana upaya untuk memecahkan masalah tersebut.

3.3.4 Wawancara

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2012) mendefinisikan wawancara sebagai berikut, *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*,⁸⁵ bahwa, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk

⁸⁴Ibid , Sugiyono hal 310.

⁸⁵Ibid, Sugiyono hal 316.

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam topik tertentu.

Peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan data melalui cara berkomunikasi langsung dengan pihak terkait dan langsung dengan permasalahan yang diteliti, agar dapat diketahui segala persoalan secara mendalam. Wawancara secara langsung diadakan pada orang yang dijadikan satuan pengamatan tanpa perantara. Untuk wawancara tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan informen untuk meminta keterangan tentang orang lain, jadi sumber datanya adalah orang lain yang bukan merupakan objek pengamatan. Pengumpulan data melalui teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan masalah sikap dan persepsi seseorang secara langsung dengan sumber data.

Penggunaan metode wawancara ini diharapkan mampu memberikan sebuah jawaban secara rinci dan terukur, tentang materi penelitian dan implementasi di lapangan. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak berkomunikasi dimintai pendapat atau ide yang dimiliki. Di samping itu, peneliti secara cepat dapat memperoleh data akurat, sehingga apabila ada kesalahan dalam penafsiran akan dapat diperbaiki pada saat itu juga dan mendapat gambaran secara obyektif. Wawancara dilakukan kepada Danpussenkav Kodiklat TNI AD beserta staf atau pejabat kompeten yang menangani MBT Leopard, maupun pejabat yang membidangi masalah satuan kavaleri TNI AD. Wawancara juga dilakukan kepada Pangdam XII/Tanjung Pura beserta staf serta kepada Gubernur Kalimantan Barat, Wakil ketua DPRD Kalimantan Barat, Pejabat Pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Barat secara sampling.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Tehnik ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan sumber data yang pada awalnya sedikit dan belum mendalam, namun secara

bertahap akan bertambah menjadi besar serta terarah.⁸⁶ Sugiyono mengatakan bahwa *Snowball* didefinisikan sebagai berikut: Seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan untuk selanjutnya dari data yang diperoleh dari sampel sebelumnya tersebut, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan serta akan memberikan jawaban serta data yang lebih lengkap. Beberapa sampel ini makin lama makin lengkap dan terarah dengan semakin fokus penelitian, hal ini akan terjadi setelah wawancara secara mendalam dilakukan dengan para pihak terkait dengan masalah yang hendak diteliti.

Penentuan nara sumber atau informan adalah orang yang relevan dengan obyek penelitian dan dipilih berdasarkan teknik *Snowball*, yaitu cara memilih informan yang mewakili proses pengumpulan data yang obyektif⁸⁷. Artinya bahwa Penulis dalam penelitian ini mencari data yang mendukung objek penelitian dari instansi TNI yang membidangi data tersebut serta pejabat yang langsung mensupervisi permasalahan tersebut. Data-data tersebut berupa data kemampuan teknis MBT Leopard dan gelar satuan kavaleri di perbatasan Kalimantan Barat.

Data kondisi pertahanan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang terkini diambil dari data Deninteldam XII/Tpr. Selain itu, penulis juga mengumpulkan kesipan daerah dari aspek infrastruktur dan prasarana yang lain yang mendukung Obyek penelitian ini. Berhubung penelitian ini terfokus pada tahapan strategi penangkalan dengan akusisi MBTLeopard, maka level penelitian dibatasi pada dua level saja yaitu; level strategis dan level taktis. Level strategis dipimpin oleh Pangdam XII/Tpr. Level taktis terkait dengan spesifikasi

⁸⁶Ibid Sugiono, hal 324

⁸⁷Ibid, Sugiyono, hal 341

teknis MBT Leopard yaitu Danpussenkav Kodiklat TNI AD. Akusisi di bidang pertahanan diarahkan untuk membangun kekuatan pertahanan negara yang memiliki efek daya tangkal dan bisa memenangkan pertempuran. Objek penelitian akan difokuskan pada aspek penempatan MBT Leopard di perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, apakah penempatan MBT Leopard tersebut dapat menjawab strategi penangkalan dalam kondisi geografis yang ada.

3.5. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data kualitatif adalah melakukan klarifikasi materi data hasil wawancara dan observasi. Kemudian memilah data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen berupa peraturan perundangan tentang Sistem Pertahanan Semesta, Perkembangan di perbatasan, ancaman yang muncul, kemampuan satuan kavaleri Denkav 2/Pontianak yang ada saat ini. Disamping itu kita olah data kemampuan MBT Leopard, pembangunan Batalyon Kavaleri 12 di Mampawah Kalimantan Barat, infra struktur yang ada serta kondisi geografi Kalimantan Barat. Selanjutnya mengelompokkan data sesuai pertanyaan penelitian berikut instrumen yang sudah disiapkan.

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada keterkaitan kebijakan TNI, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peneliti mendeskripsikan keseluruhan data dan melihat keterkaitan antar kegiatan yang berkenaan dengan fokus masalah tentang tinjauan gelar satuan kavaleri TNI AD di perbatasan darat Indonesia-Malaysia sebagai pendukung strategi penangkalan dalam rangka kebijakan pertahanan negara, melalui studi penempatan *main battle tank* Leopard.

Peneliti menggunakan analisis ini agar dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul kemudian dilakukan interpretasi data.

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui valid atau tidaknya data atau temuan. Data atau temuan bisa dinyatakan valid bila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

3.6.1. Data kualitatif pada umumnya berbentuk pernyataan atau gambaran tentang sesuatu dalam yang dijelaskan baik dalam bentuk kata-kata/kalimat atau tulisan. Yang menjadi perhatian disini adalah bagaimana menganalisis pernyataan dalam bentuk kata-kata/kalimat atau tulisan tersebut. Analisis data kualitatif menyangkut identifikasi apa yang menjadi perhatian dan apa yang menjadi persoalan dengan cara : Mengkategorisasikan/menyusun kembali catatan dari hasil observasi, wawancara menjadi bentuk yang lebih sistematis; Memprioritaskan apabila banyak sekali kategori, dengan demikian manayang perlu ditampilkan dan mana yang tidak perlu ditampilkan, agar tidak menyulitkan dalam menginterpretasi; Penentuan kelengkapan, kapan proses kategorisasi dianggap telah lengkap. Jumlah kategori yang terkumpul sudah cukup dan kategori yang dikumpulkan telah menjawab semua perhatian maupun persoalan⁸⁸. Jumlah atau jenis kategori dianggap sudah layak apabila secara logika rangkaian kategori dapat diterima, artinya permasalahan yang muncul dapat dijelaskan dengan kategori yang dihasilkan, namun bila kategori yang dihasilkan tidak dapat menjawab permasalahan yang menjadi perhatian, berarti kategori yang dikumpulkan belum cukup.

⁸⁸Ibid, Sugiyono, hal 253

Data tentu saja perlu disusun kedalam pola tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, tema tertentu atau pokok permasalahan tertentu. Oleh karena itu, setiap catatan harian yang dihasilkan dalam pengumpulan data, apakah hasil wawancara atau hasil observasi, perlu direduksi dan dimasukkan kedalam pola, kategori, fokus, atau tema yang hendak dipahami dan dimengerti "duduk soalnya"⁸⁹. Dan akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu dari hasil pemahaman dan pengertiannya. Pengumpulan data, reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan bukanlah sesuatu yang berlangsung secara linear, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif.

Muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan dengan sesuatu masalah yang teliti; dari sinilah lahir kesimpulan-kesimpulan yang bobotnya tergolong komprehensif dan mendalam.⁹⁰ Dalam hal ini peneliti berusaha menggambarkan berkenaan dengan hasil penelitian tentang penempatan MBT Leopard di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan analisis data kualitatif:

1. Untuk mencapai tujuan pertama dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder yang berhubungan dengan lokasi penempatan MBT Leopard di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Propinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mencapai tujuan kedua dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder yang berhubungan

⁸⁹Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, Hal 256

⁹⁰Ibid, Hal 258

dengan dampak penempatan MBT Leopard di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Propinsi Kalimantan Barat.

3.6.2 Peneliti mendiskripsikan keseluruhan data dan melihat keterkaitan antar kegiatan yang berkenaan dengan fokus masalah tentang efektifitas satuan kavaleri yang ada saat ini, serta bagaimana gelar, kemampuan dan kekuatan satuan kavaleri yang di harapkan di perbatasan darat Indonesia–Malaysia di wilayah Kalimantan Barat, secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul kemudian dilakukan interpretasi data.

3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.

3.7.1 Penelitian dilakukan di Bandung, Jakarta, Pontianak dan Mempawah. Sedangkan Studi Kepustakaan menggunakan beberapa buku referensi untuk dijadikan sebagai acuan dalam penulisan tesis yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Pertahanan, Perpustakaan Nasional, Kantor Bapeda dan KimpraswilPontianak, dan Perpustakaan Pussenkav Kodiklat TNI AD.

3.7.2 Waktu penelitan ini dimulai pada Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni s/d 31 Oktober 2013. Adapun rincian mengenai waktu dan lamanya penelitian terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	KEGIATAN	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt
1	Tahap 1	Proposal penelitian								
	a.Susun proposal									
	b.presentasi Proposal									
	c.Perbaikanproposal									
2	Tahap 2	Menulis Tesis								
	a.Susun pertanyaan									
	b.Penelitian Lapangan									
	c. Pengolahan data & Analisa									
	d..Menulis Tesis									
	e. Koreksi									
3.	Tahap 3	Akhir tesis								
	a.Selesai bimbingan									
	b.Revisi tesis									
	c.Tesis selesai									

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.

4.1.1. Kondisi Kekuatan Satuan Kavaleri di Perbatasan.

4.1.1.1. Deskripsi Satuan Kavaleri TNI AD.

“Tri Daya Cakti” (*Daya Gerak - Daya Tembak – Daya Kejut*) adalah motto Satuan Kavaleri (*Satkav*) TNI AD sebagai perwujudan sinergis gabungan kemampuan (*Combined Capability*) yang meliputi : daya tembak yang “*cepat-tepat-dahsyat*”, daya gerak/*mobilitas* yang “*dinamis-lincah-tangguh*”, sistem komunikasi yang “*luas-kenyal-aman*”, serta dilengkapi dengan aplikasi teknologi pada sistem perlindungan, sistem observasi/peninjauan, sistem navigasi dan sistem komando pengendalian yang “*canggih-mutakhir-modern*”.

Ciri-ciri Kavaleri TNI AD adalah sebagai berikut:

- a. Satuan kavaleri TNI AD dilengkapi dengan Alat Utama Sistem Senjata (*Alutsista*) berupa kendaraan tempur (*Ranpur*) berlapis baja (*Berba*) yang memiliki spesifikasi teknis berupa Ranpur beroda rantai (*Tank*) dan Ranpur beroda ban (*Panser*). Ranpur Satuan kavaleri TNI AD, baik Tank maupun Panser dilengkapi sistem senjata dengan kemampuan daya tembak yang dahsyat, kelincahan gerak dan mobilitas tinggi, sistem komunikasi yang luas dan kenyal, yang dipadukan dengan kemampuan aplikasi teknologi terkini pada sistem observasi/peninjauan, sistem navigasi dan sistem komando pengendalian (*Kodal*) yang canggih, serta sistem perlindungan yang kokoh menjadikan Satuan kavaleri TNI AD memiliki daya kejut dan daya gempur yang dahsyat.

b. Penyusunan Organisasi dan Tugas (Orgas) Satuan kavaleri TNI AD disesuaikan dengan fungsi utama kavaleri yang meliputi :

- 1) Fungsi penggempur yaitu melakukan tugas-tugas pertempuran di darat yang bersifat offensif dengan daya gerak, daya tembak dan daya kejut untuk mendekati dan menghancurkan musuh terutama penghancuran Tank lawan serta memperbesar atau menambah daya gempur satuan yang dibantu.
- 2) Fungsi Pengamanan yaitumemberikan pengamanan kepada satuan besar, kesenjataan lain dan atau satuan besar gabungan serta melaksanakan tugas-tugas sebagai pasukan penghemat tenaga.

Jenis Ranpur Satuan kavaleri TNI AD berdasarkan fungsi, klasifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai penugasan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu Ranpur dengan tipe kelas ringan/*light armoured vehicle* (Berat < 15 ton), kelas menengah/*medium armoured vehicle* ($15 \leq$ Berat \leq 30 ton) dan kelas berat/*heavy armoured vehicle/Main Battle Tank – MBT* (Berat > 30 ton).

Penggolongan jenis Ranpur.

a Ranpur Satuan kavaleri TNI AD yang melaksanakan fungsi Penggempur:

- 1) Spesifikasi Ranpur, Kanon yang digunakan adalah Ranpur dengan tipe Ranpur kelas sedang/*medium armoured vehicle* ($15 \text{ Ton} \leq$ berat $\leq 40 \text{ Ton}$) dan Ranpur kelas berat/*heavy armoured vehicle/MBT* (berat $\geq 40 \text{ Ton}$).

2) Ranpur AP (Angkut Personil) yang digunakan oleh Peleton Kavaleri berfungsi sebagai Ranpur pengangkut Tim Bantuan (*Support Unit*) dengan tipe Ranpur kelas sedang/*medium armoured vehicle* (15 Ton \leq berat \leq 40 Ton).

3) Spesifikasi senjata Ranpur Kanon yang digunakan adalah untuk tipe Ranpur kelas sedang menggunakan senjata kanon kaliber 90 mm atau 100 mm atau 105 mm dan untuk tipe Ranpur kelas berat (MBT) menggunakan senjata kanon kaliber 120 mm atau 125 mm. Spesifikasi senjata Ranpur AP (tipe Ranpur kelas sedang) yang digunakan oleh Tonkav adalah menggunakan senjata kanon kaliber 25 mm/30 mm/ 40 mm dengan sistem turret atau *Remote Control Weapon System* (RCWS).

b Ranpur Satuan kavaleri yang melaksanakan fungsi Pengamanan.

1) Spesifikasi Ranpur yang digunakan adalah Ranpur dengan tipe Ranpur kelas ringan/ *light armoured vehicle* (berat \leq 15 Ton).

2) Spesifikasi Ranpur Kanon yang digunakan adalah meliputi Ranpur Kanon dengan tipe Ranpur kelas ringan / *light armoured vehicle* (berat \leq 15 Ton) atau tipe Ranpur kelas sedang/ *medium armoured vehicle* (15 Ton \leq berat \leq 40 Ton).

3) Ranpur AP (Angkut Personel) yang digunakan oleh Peleton Kavaleri berfungsi sebagai Ranpur pengangkut Tim Bantuan (*Support Unit*) dengan tipe Ranpur kelas ringan/*light armoured vehicle* (berat \leq 15 Ton).Spesifikasi senjata Ranpur Intai (tipe Ranpur kelas ringan) yang digunakan adalah senjata kanon kaliber 25 mm / 30 mm / 40 mm dengan sistem turret/RCWS dan senjata ATGM(*Anti Tank Guide Missile*)

Perubahankarakteristik bertempur saat ini mendorong Kavaleri TNI AD untuk melaksanakan perubahan Doktrin dihadapkan dengan pencapaian postur TNI AD sampai dengan 2029. Dengan perubahan tersebut, Alutsista satuan Kavaleri TNI AD yang ideal adalah Ranpur baik beroda ban (*Panser*) maupun beroda rantai (*Tank*) yang dilengkapi senjata khususnya senjata kanon baik kaliber besar maupun kaliber kecil sesuai fungsi utama satuan Kavaleri yaitu sebagai Fungsi Penggempur dan Fungsi Pengaman.

a **Fungsi penggempur**, melakukan tugas-tugas pertempuran di darat yang bersifat offensif dengan daya gerak, daya tembak dan daya kejut sehingga menghasilkan daya gempur yang dahsyat untuk mendekati dan menghancurkan musuh penghancuran sasaran lawan berupa Tank, Berba, motoris yang dilengkapi dengan SLT, Pesawat, Helly, Armed dan gedung atau bangunan yang dijadikan pertahanan sementara musuh serta memperbesar atau menambah daya gempur satuan yang dibantu. Dalam pelaksanaan tugasnya satuan ini dilengkapi dengan Ranpur Tank/Panser khususnya Ranpur Kanon kaliber besar (90 mm s.d 125 mm) dengan klasifikasi kelas sedang maupun kelas berat.

b. **Fungsi pengaman**, melakukan tugas pengamanan kepada satuan yang lebih besar (Operasi Gabungan Matra Darat dan atau dalam konteks Operasi Gabungan Tri Matra Terpadu), obyek vital Nasional, VIP dan VVIP sebagai satuan kawal, satuan tirai, Satuan pengaman dan Satuan pengintai. Dalam pelaksanaan tugasnya satuan ini akan dilengkapi dengan Ranpur Tank/Panser dengan klasifikasi kelas ringan maupun kelas sedang.

MBT Leopard, memiliki keunggulan antara lain:

a. **Mobilitas dan Operasional**. Kemampuan mobilitas Ranpur MBT Leopard untuk melintasi medan dengan kecepatan maksimal 70 km/jam. Sistem Ranpur ini sudah menggunakan mesin Jenis MTU MB 873 Diesel *Turbo Charge Intercooler* diatas Euro 3, jenis mesin ini rata – rata sudah diproduksi diatas tahun 1990–an. Dengan *Power-to-weight-ratio* yang dihasilkan sebesar 25 hp/ton sehingga telah memenuhi persyaratan KSU yaitu ≥ 20 hp/ton dengan *Power-to-weight-Ratio* tersebut, maka tidak berpengaruh terhadap kemampuan tenaga mesin dikaitkan dengan bobot Ranpur khususnya untuk melintasi medan-medan berat.

b **Lindung lapis baja**. Bagian bodi Tank merupakan konstruksi baja dengan tambahan baja komposit di bagian depannya, bagian depan kubah, atap depan dan samping serta bawah telah ditambahkan lapisan baja anti ledakan.

c. **Daya tembak**. MBT Leopard dipersenjatai dengan senjata utama Kanon 120 mm, senjata pendukung coaxial 7,62 mm dan senjata PSU 12,7 mm serta dilengkapi dengan penuntun laser (*Anti Tank Laser Guided Missile*). Memiliki kemampuan menembak secara tepat, cepat dan akurat baik secara taktis maupun secara dinamis, baik siang hari maupun

malam hari. Hal ini dikarenakan dalam sistem penembakannya full elektrik yang dilengkapi dengan *Image Stabilized, Laser Range Finder, Night Vision* dan sistem komputerisasi pengolahan data penembakan (*Computerized Data Fire Control Proses*). Adanya *image-stabilized fire control system* untuk dapat menembak secara bergerak, adanya *night vision* memungkinkan untuk melaksanakan penembakan malam hari.

d. **Sistem komunikasi.** Alkom yang digunakan sesuai keinginan pengguna (*optional*), sehingga hal ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Satuan kavaleri TNI AD, dan dapat diintegrasikan dengan *Battle Management System* (BMS) serta memenuhi standar spesifikasi militer STD MIL 810 F dan 461.

e. **Sistem Pengintaian.** Ranpur ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas kamera pengintai dan layar monitor, baik untuk pengemudi, penembak dan Komandan Kendaraan serta memiliki kelengkapan dan aplikasi teknologi tercanggih karena adanya sistem navigasi *GPS* dan peta digital, *Driver's night vision*.

f. **Sistem Perlindungan.** Dilengkapi dengan aplikasi *Explosive Reactive Armor* (ERA), *NBC protection* dan *Automatic fire extinguisher*.

g. **Sistem Suspensi.** Suspensi yang digunakan adalah *torsion bar* dan *hydraulic pneumatic*. Sistem ini memberikan kenyamanan bagi awak Ranpur pada saat melintasi medan-medan berat (bergelombang) dan pada saat melaksanakan penembakan pada medan yang tidak rata.

h. MBT Leopard memiliki kemampuan mengarung dengan *fording* sedalam 2 - 4 m dengan persiapan.

j. **Suku Cadang.** Merupakan produk terbaru dari pabrikan yang memiliki reputasi internasional sebagai pabrikan yang telah sangat lama berkecimpung dalam produk Ranpur kelas dunia. Sehingga jaminan ketersediaan suku cadang (*spare part*) dari pabrikan sampai dengan 25 tahun. Bila dilihat secara sekilas maka Ranpur Tank Leopard dengan mesin MTU akan mudah mendapatkan alternatif suku cadang karena jenis mesin tersebut banyak digunakan dipasaran umum dengan ketentuan harus sesuai spekter dan kemampuan yang digunakan/diinginkan. Negara pembuat MBT Leopard menjamin tidak adanya embargo terhadap suku cadang yang akan dibutuhkan.

k. **Pendidikan dan latihan.** Secara umum Ranpur tersebut tidak terlalu berbeda jauh dengan Tank Kanon yang sudah dimiliki satuan kavaleri TNI AD saat ini, yaitu Tank Scorpion dan Tank AMX-13, sehingga pendidikan yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan kavaleri dan latihan yang dilaksanakan di satuan dapat menyesuaikan dengan cepat. Kecuali pada *Crew Load* munisi kanon perlu pendidikan dan pelatihan secara khusus. Penguasaan terhadap teknologi pendukung terkini akan dimasukkan dalam paket pengadaan (Kontrak) sejalan dengan *Transfer of Tehnology* (TOT) dalam program pelatihan yang akan diberikan oleh pihak pabrikan (TOT juga melibatkan BUMNIP).

a. **Kedudukan.**

Detasemen Kavaleri yang ada saat ini seluruhnya berkedudukan langsung di bawah Panglima Daerah Militer (Pangdam) dan kondisi tersebut tidak menimbulkan permasalahan di bidang organisasi.

b. **Tugas Pokok.**

Tugas pokok Detasemen kavaleri yang tertuang pada Orgas Denkav sesuai Keputusan Kasad Nomor Kep/15/X/1996 tanggal 4 Oktober 1996 adalah melaksanakan pertempuran darat yang bersifat mobil atau mendukung penciptaan stabilitas keamanan wilayah dengan menggunakan kendaraan tempur Panser dan Tank dalam rangka membantu tugas pokok Kodam.

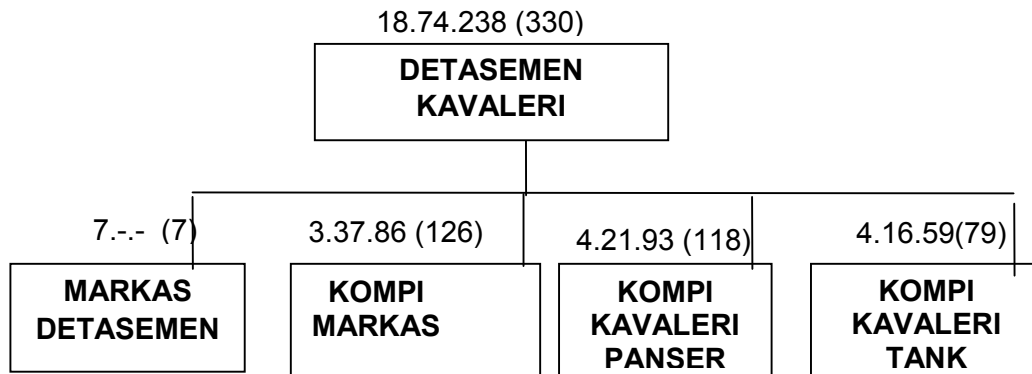
c. **Fungsi/Tugas-tugas.**

Fungsi yang tertuang dalam Organisasi dan Tugas Detasemen Kavaleri TNI AD saat ini meliputi intelijen, operasi dan administrasi (Personel dan Logistik). Jabaran fungsi ini sesuai dengan Fungsi/tugas-tugas satuan kavaleri baik fungsi utama, fungsi organik militer dan fungsi organik pembinaan.



Gambar 4.2 Satuan Denkav 2/Pontianak Beruang Cakti

d. **Struktur Organisasi.**



Gambar 4.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi detasemen Kavaleri yang ada saat ini, jumlah dan komposisi personel sesuai kepangkatan sebagai berikut :

NO	PERSONEL	DENKAV
1	Letkol	-
2	Mayor	1
3	Kapten	9
4	Letnan	8
5	Pelda/Peltu	4
6	Serma	12
7	Serka	26
8	Serda/Sertu	32
9	Kopka	46
10	Kopda/Koptu	76
11	Praka	89
12	Prada/Pratu	27
	Jumlah	330

Gambar 4.4 Tabel Personel Detasemen Kavaleri 2/Pontianak.

e. **Perlengkapan/Materiil.** Perlengkapan/materiil khususnya Alutsista Ranpur yang dimiliki oleh satuan, yaitu :

NO	JENIS RANPUR	DENKAV
1	Tank Komando	3
2	Tank Kanon	9
3	Tank APC	3
4	Tank Ambulance	1
5	Tank Logistik	-
6	Tank Recovery	3
7	Tank AVLB	-
8	Tank Mortir	-
9	Panser Komando	1
10	Panser Intai	6
11	Panser Kanon	6
12	Panser APC	6
13	Panser Ambulance	-
14	Panser logistik	-
Jumlah		38

Gambar 4.5. Tabel Materiil Detasemen Kavaleri 2/Pontianak.



Gambar 4.6 Kendaraan Tempur Denkav 2/Pontianak Beruang Cakti

Program latihan terkadang mengalami kendala dengan adanya kegiatan-kegiatan protokoler sehingga kurang maksimal dilaksanakan. Permasalahan:

- a. Keterbatasan alat peralatan yang dimiliki satuan dalam mendukung setiap latihan yang diselenggarakan.
- b. Terbatasnya dukungan sarana angkutan Tank Transporter minimal 2 unit untuk memudahkan Pinpas Ranpur dari Home Base menuju daerah latihan.
- c. Terbatasnya senjata organik (Senjata Pistol P.1 untuk Kompi Markas dan Tank) sehingga latihan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana latihan bagi satuan Denkav-2/Pontianak Beruang Cakti untuk dapat meningkatkan pelaksanaan latihan satuan terutama lapangan tembak senapan dan kolam renang.
- e. Terbatasnya alat bidik/periskop khususnya alat bidik Ferret dan Saladin.

4.1.2. Kondisi Kemampuan.

4.1.2.1. Koondisi Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

4.1.2.1.1 Kondisi Politik.

Ketidakjelasan batas antar negara merupakan permasalahan yang dapat merugikan NKRI. Permasalahan batas sebagai hasil ukuran bersama di lapangan tidak berhimpit dengan peta-peta yang beredar, yaitu peta Sarawak atau peta Sabah skala 1:50.000, serta peta hasil plotting foto udara. Penyimpangan yang timbul bermacam-macam dan luasnya berbeda-beda. Ada yang menyimpang ke wilayah Indonesia (merugikan) tetapi ada pula yang menyimpang ke arah Malaysia (menguntungkan). Menurut Sudrajat

(Ahli peneliti utama pada pusat Litbang Hutan dan Konversi Alam, 2012, 4), penyimpangan tersebut merupakan gambaran fiktif, sebab nilai yang benar dan dipercaya adalah hasil ukuran bersama. Apabila hasil ukuran bersama atas *watersheed* kemudian diplot di atas peta lama, maka letak *watersheed* tidak berhimpit, maka terjadi apa yang disebut sebagai non konsidensi.

Belum ditetapkannya peraturan perundangan mengenai kawasan perbatasan. Peraturan dan perundangan yang mengatur titik-titik koordinat kawasan belum ada. Untuk itu perlu segera disusun suatu produk hukum yang dapat memberikan kekuatan bagi pengelolaan dan penanganan kawasan perbatasan.

Lemahnya penegakan hukum (*law-enforcement*) di kawasan perbatasan. Kasus ilegal di kawasan perbatasan disebabkan kurangnya penegakan hukum. Hal ini karena keterbatasan infrastruktur dan komitmen dari elemen masyarakat serta *political will* pemerintah yang belum sepenuhnya menyatu.

Perlunya pemangkasan kelembagaan untuk menghasilkan suatu lembaga baru yang mengurus kawasan perbatasan. Kurang terlaksananya program pembangunan di kawasan perbatasan menunjukkan perlunya dibentuk lembaga khusus yang menangani kawasan perbatasan. Pembentukan lembaga atau badan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu lembaga/institusi/badan yang adil, transparan, dan dapat memadukan persepsi dan opini aparatur negara tentang peranan dan fungsi dalam pengelolaan perbatasan.

Kondisi politik Kalimantan Barat yang kondusif dan stabil merupakan peluang yang baik dalam membangun daerah perbatasan. Kesadaran masyarakat dalam berpolitik dapat digunakan pijakan oleh Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang representatif. Pembangunan di wilayah perbatasan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka tetap menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan wilayah perbatasan akan efektif bila ada

sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan TNI dan semua unsur terkait di wilayah perbatasan.

4.1.2.1.2. Kondisi Ekonomi.

Permasalahan yang terjadi pada kehidupan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan, merupakan suatu respon oleh kurangnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan wilayah khususnya dalam mengajak peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa fenomena permasalahan yang muncul di dalam kehidupan sosial masyarakat antara lain: Adanya ketergantungan sosial ekonomi terhadap negara tetangga. Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, khususnya jalan untuk mendukung interaksi lokal antar warga. Selain itu kawasan perbatasan juga kurang tersentuh oleh program-program pemerintah. Banyak warga yang merasa terasing di negerinya, atau daerahnya sendiri karena jalan yang tersedia adalah jalan yang menghubungkan dengan negara tetangga. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang bergantung dari negara tetangga. Mereka bisa memasuki wilayah negeri tetangga untuk memasarkan hasil pertaniannya, sekaligus membeli kebutuhan pokok. Interaksi warga lebih intensif dilakukan dengan warga negara tetangga karena belum tersedia jalan menuju kota Kabupaten.

Mahalnya biaya hidup akibat perbedaan nilai mata uang (Indonesia dengan Malaysia). Ketergantungan ekonomi ke negara tetangga akibat terbatasnya infrastruktur juga memberikan dampak lanjutan bagi masyarakat. Kondisi ini dapat terlihat dari mahalnya kebutuhan hidup sehari-hari akibat perbedaan nilai mata uang, karena harga dipatok sesuai dengan nilai mata uang Ringgit. Masyarakat terpaksa membeli barang dengan harga yang jauh berbeda sehingga cukup menyulitkan masyarakat ditambah dengan terbatasnya lahan

pekerjaan membuat mereka harus bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sarawak, bahkan melakukan perdagangan ilegal.

Adanya kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang cukup besar di kedua negara. Kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi sangat terlihat di antara dua kawasan perbatasan. Di Kalimantan Barat masyarakat sangat terisolasi akibat tidak tersedianya infrastruktur yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi/ kesejahteraan dapat dilihat dari adanya perbedaan pendapatan per kapita di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak.

Kawasan perbatasan menjadi *hinterland* dari Negara Malaysia. Adanya ketergantungan dan kesenjangan masyarakat menjadikan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat menjadi *hinterland* Negara Malaysia. Fenomena tersebut dapat terlihat dari aktivitas warga kawasan perbatasan Bengkayang Kalbar dengan Serikin Sarawak yang membawa bidai-tikar khas masyarakat pedalaman Kalimantan Barat dari anyaman rotan dan kulit kayu. Hal ini dilakukan karena di Serikin adalah pasar terdekat, hanya sekitar 10 kilometer dari perbatasan, sementara dengan Kota Bengkayang berjarak 91 km. Demikian juga yang terjadi di Jagoibabang.

Kegiatan ekonomi masyarakat belum memberi nilai tambah dari potensi SDA yang ada (belum ada diversifikasi kegiatan ekonomi). Potensi SDA yang dimiliki oleh kawasan perbatasan Kalbar sangat besar, baik komoditi pertanian, perikanan, bahkan kehutanan. Akan tetapi, belum ada pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah hasil alam yang telah dikelola tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena tidak tersedianya infrastruktur yang dapat menjadi stimulus perkembangan kewirausahaan di kawasan tersebut. Kegiatan ekonomi yang berlangsung hanya pengambilan hasil alam dan tidak menghasilkan produk lain yang diwujudkan dalam industri hulu dan hilir.

Perdagangan ilegal terjadi apabila terdapat disparitas antar wilayah dengan aturan yang berbeda (dua negara). Satu wilayah membutuhkan barang dari wilayah lainnya dan sebaliknya, sementara posisi tawar tidak seimbang. Hal lainnya adalah lemahnya kemampuan penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum di wilayah tersebut karena berbagai sebab. Keadaan seperti inilah yang terjadi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Perdagangan ilegal yang sangat mencolok adalah jual-beli kendaraan bermotor dari negara tetangga tanpa disertai surat-surat.

Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau indikator ekonomi lainnya seperti ketimpangan wilayah dan tingkat kemiskinan. Guna lebih menajamkan analisis aspek pengembangan wilayahnya, maka beberapa indikator lain digunakan dalam analisis bagian ini. IPM adalah indeks komposit yang terdiri dari indeks harapan hidup yang menggambarkan derajat kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli dengan skala antara 0 sampai 100. IPM Propinsi Kalbar mengalami penurunan dari 63,6 pada tahun 2010 menjadi 60,6 pada tahun 2012. Secara nasional indeks tersebut menempatkan Kalimantan Barat pada urutan 23 dari 26 Propinsi. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat relatif rendah.

Berdasarkan IPM per Kabupaten, khususnya perbatasan, maka terlihat adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan. Kabupaten Bengkayang dan Sambas merupakan Kabupaten dengan IPM terendah yakni sebesar 57,4, sedangkan IPM tertinggi Kota Pontianak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan yang nyata antara wilayah perkotaan dengan perbatasan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan masih bersifat sektoral. Selama ini pengelolaan kawasan

perbatasan sebagai kawasan prioritas masih bersifat sektoral. Setiap departemen yang memiliki kepentingan dapat melaksanakan programnya apabila terkait dengan kawasan perbatasan. Belum adanya koordinasi yang baik menyebabkan pelaksanaan program hanya ditujukan bagi kepentingan setiap sektor saja dan tidak ada keterpaduan antar sektor dalam perencanaan yang terpadu. Untuk itu perlu disusun konsep menyeluruh mengenai kawasan perbatasan untuk menjadi payung dalam pengembangan kawasan perbatasan.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam kelanjutan pembangunan kawasan perbatasan. Keterisolasian kehidupan sosial setempat mengurangi komitmen dalam menjaga keutuhan dan pembangunan kawasan. Dalam pengelolaan selama ini seharusnya diadakan pendekatan terhadap masyarakat setempat, khususnya suku-suku pribumi, dan mengajak untuk bersama-sama mengembangkan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan di wilayah perbatasan bernilai sangat strategis karena disamping untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga sekaligus memiliki arti yang sangat signifikan dari sisi kepentingan pertahanan.

4.1.2.1.3 Kondisi Sosial-Budaya.

Eratnya hubungan kekerabatan antar suku di kedua kawasan perbatasan yang menyulitkan kepastian batas. Suku Dayak yang berada di kawasan Kalbar dan Sarawak mempunyai hubungan kekerabatan (sama-sama satu Dayak) yang cukup erat. Hal ini dilihat dari kebiasaan suku tersebut untuk saling berkunjung. Kondisi seperti ini jika terjadi pergeseran patok pada wilayah perbatasan dimana satu suku hidup namun secara kewarganegaraan berbeda, akan saling menutupi.

Potensi separatisme adalah potensi yang diramalkan dapat terjadi apabila tidak dilakukan pendekatan kepada masyarakat. Potensi ini dapat dilihat oleh adanya kesamaan suku, bahasa dan adat

istiadat, seperti suku Dayak Iban di kawasan perbatasan Kalbar dengan Sarawak. Selain itu solidaritas sosial antar masyarakat suku tersebut masih tinggi. Kendati demikian, tingkat kehidupan masyarakat Iban di wilayah Malaysia jauh lebih sejahtera dibanding yang tinggal di Indonesia. Potensi lain adalah aspek geografis, di mana wilayah Kalbar dan Sarawak masih dalam satu daratan. Hal ini memungkinkan terjadinya mobilisasi penduduk antar wilayah dengan kemungkinan yang terburuk adalah masyarakat setempat secara diam-diam menggeser batas negara Indonesia masuk ke wilayah Malaysia, lalu mengukuhkan diri menjadi warga negara Malaysia. Hal tersebut dapat saja terjadi mengingat masyarakat perbatasan lebih banyak menerima informasi (TV dan Radio) dari media Malaysia.

Perdagangan wanita dan anak-anak. Perdagangan ini disebabkan kurangnya lahan pekerjaan di Indonesia umumnya dan kawasan perbatasan khususnya. Hal ini juga turut didukung oleh letak Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Bahkan dipermudah oleh adanya 50 jalur setapak yang menghubungkan kedua negara. Transaksi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh calo tanpa melalui proses birokrasi dengan jaringan yang tersusun secara rapi dengan para calo di Malaysia. Keterlibatan masyarakat dalam proses *illegal logging*. Kurangnya infrastruktur dan tingginya tingkat kesenjangan antara kedua negara membuat masyarakat kawasan perbatasan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Dalam proses kegiatan *illegal logging* yang marak terjadi, sebagian masyarakat perbatasan ikut terlibat untuk mendapatkan penghasilan yang menggiurkan. Keterlibatan ini antara lain kebutuhan tenaga kerja atau buruh dalam pembalakan liar dan bukan pelaku utama.

Kerukanan antar suku yang ada di Kalimantan Barat, antara warga pendatang dengan warga dayak merupakan modal yang sangat penting. Hal tersebut bila di daya gunakan secara efektif, merupakan kekuatan yang sangat luar biasa dalam rangka tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga wilayah perbatasan akan lebih memudahkan dalam menyusun pertahanan wilayah perbatasan termasuk di dalamnya rencana penempatan MBT Leopard di wilayah perbatasan.

4.1.2.2 Kondisi Pertahanan dan Keamanan.

Illegal logging adalah praktek eksploitasi hasil hutan secara tidak sah dari kawasan hutan negara melalui aktivitas penebangan pohon dan atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Pengertian ini dirumuskan berdasarkan kegiatan yang meliputi praktek *illegal logging*, *illegal processing*, dan *illegal trading* dalam kegiatan eksploitasi hutan secara illegal.

Hasil analisis dari Bank Dunia, laju penyusutan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun (berdasarkan analisis data penebangan dan konversi sejak tahun 2010). Lebih ekstrem, artikel di New Scientist edisi tahun 2012 memprediksi bahwa laju penyusutan hutan saat ini telah mendekati 3.6 juta hektar per tahun, yang menurut PBB merupakan seperempat penyusutan hutan alam global dengan laju penyusutan tertinggi di dunia (Greenpeace, 2012). Jika laju penyusutan tersebut dihitung 2.5 juta per hektar per tahun, maka seluas 5 Ha hutan Indonesia rusak setiap menitnya atau sama saja dengan seluas lapangan bola untuk setiap 12 detik. Bank Dunia memperkirakan bahwa hutan dataran rendah Sumatera akan lenyap pada tahun 2012 dan hutan dataran rendah Kalimantan pada tahun 2012, jika laju penyusutan hutan saat ini terus berlangsung.

Kurangnya SDM dan teknologi dalam mengawasi kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan Kalimantan menjadi tempat dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan ilegal. Apalagi ditambah dengan kondisi infrastruktur, khususnya jalan yang masih sangat minim. Menurut Kepala Dinas Penerangan Polda Kalimantan Barat,

sedikitnya terdapat 21 titik rawan kasus pelanggaran batas RI-Malaysia yang tersebar di sepanjang perbatasan Kalbar -Sarawak. Pelanggaran yang menonjol adalah penyelundupan kayu dari Kalbar ke Sarawak, dan pelintas batas ilegal, baik dari Sarawak ke Kalbar atau sebaliknya. Kepolisian setempat baru mampu mengamankan enam titik. Keenam titik itu adalah di Badau (Kapuas Hulu), Senaning (Sintang), Jagoibabang serta Sungai Bening (Bengkayang), Entikong (Sanggau), dan Paloh (Sambas). Kendala bagi polisi dan militer untuk mengamankan ke-15 titik lainnya adalah keterbatasan personel. Namun, persoalan yang paling mendasar yakni ke-15 titik tersebut *masih terisolasi*. Selain itu belum ada teknologi yang dapat menjadi jawaban bagi kendala fisik kawasan perbatasan yang sulit dijangkau dan sebagian besar berupa perbukitan. Saat ini sarana yang tersedia sangat memprihatinkan. Dari 30 pos penjagaan, hanya tersedia enam unit *global positioning system* (GPS) untuk menentukan titik daerah perbatasan.

Masalah pergeseran patok-patok perbatasan. Patok-patok perbatasan yang berada di sepanjang garis perbatasan masih banyak yang berupa tiang-tiang setinggi ± 50 cm. Pada tahun 2012 Departemen Pertahanan mengidentifikasi 300 sampai 400 dari 18.500 titik patok perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kalbar dan Kaltim mengalami pergeseran, atau bahkan hilang. Pada tahun 2003 Direktur Strategi dan Pertahanan Departemen Pertahanan, mengakui khusus perbatasan Kaltim - Sabah dan Kalbar - Sarawak, dari 1.700 titik patok tapal batas yang sudah dibangun sejak 1976, sekitar 800 titik di antaranya dinyatakan hilang dan 8 titik lagi masih bermasalah karena belum tercapai kesepakatan Indonesia-Malaysia. Patok yang terletak di sepanjang 1.850 kilometer di utara Kaltim dan Kalbar itu hilang akibat faktor alam seperti erosi, juga akibat aksi perambahan hutan. Permasalahan mengenai penetapan patok-patok ini juga ditambah dengan belum adanya kesepakatan secara pasti dan hukum dari negara RI yang mengatur mengenai titik-titik perbatasan, terutama

setelah lepasnya Sipadan dan Ligitan. Selain itu ada warga Indonesia yang memiliki lahan pertanian di Malaysia dan juga sebaliknya.

Dengan demikian perlunya segera dituntaskan demarkasi (penetapan batas wilayah negara) antara dua negara dengan isu :Belum terselesaikannya kesepakatan beberapa segmen garis batas di beberapa titik seperti di Tanjung Datuk, Gunung Raya, G. Jagoi, Batu Aum dan Nanga Badau.Belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi penataan batas wilayah negara secara terintegrasi.Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan. Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat akibat rusaknya patok batas negara.

Kurangnya Pos Pengawasan Lintas Batas. Terbatasnya pos pengawasan lintas batas (PPLB) memberikan kemudahan bagi pelaku tindakan ilegal karena kegiatan tidak dapat dimonitor oleh pihak keamanan Indonesia. Untuk itu diperlukan penambahan PPLB yang didukung dengan teknologi yang dapat menutupi keterbatasan kemampuan pengawasan secara manual. Kuantitas dan kualitas aparat keamanan dan sarana prasarana menjadi isu yang perlu untuk di perhatikan yaitu : Kurangnya personel keamanan (TNI, Polri) di perbatasan. Kurangnya Jumlah Pos Pamtas yang ada. Kurang memadainya sarana-prasarana yang ada di Pos Pengamanan Perbatasan, dimana kondisinya masih sangat memprihatinkan (belum seluruhnya merupakan bangunan permanen).

4.1.2.3. Gelar kekuatan TDM

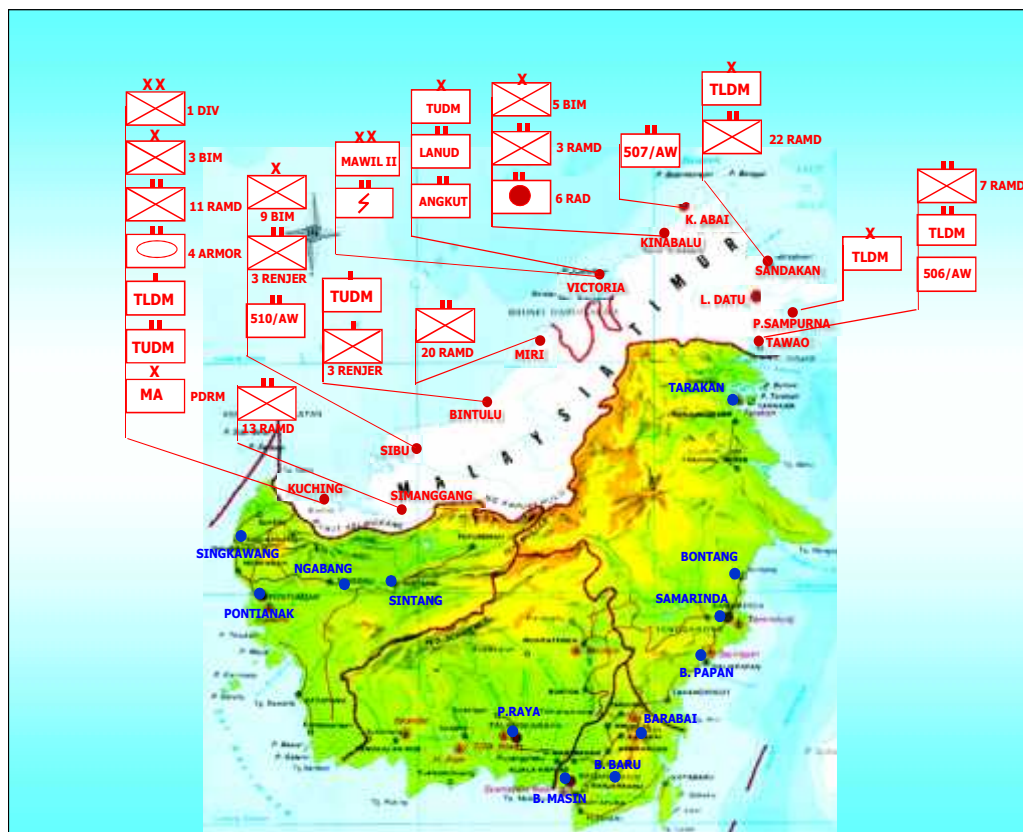
Keunggulan Malaysia dalam sistem pertahanan darat. Pertahanan dan keamanan di Indonesia belum didukung perlengkapan dan peralatan persenjataan yang baik. Tersedianya jalan aspal di kawasan perbatasan negara Malaysia, yang diperkirakan dapat didarati oleh pesawat, maka sistem pertahanan

darat Indonesia di kawasan perbatasan Kalbar tidak dapat mengungguli sistem pertahanan di Malaysia. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur jalan penting bagi pertahanan keamanan kawasan perbatasan.

Perkembangan situasi regional yang mengemuka saat ini adalah memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Malaysia khususnya masalah perbatasan darat dan laut di wilayah Kalimantan dan sekitarnya, yaitu adanya upaya provokasi pihak Malaysia baik di wilayah perbatasan darat maupun di wilayah laut blok Ambalat. Kemungkinan konflik yang dapat terjadi terlihat dari beberapa indikasi sebagai berikut :

1. Langkah pihak Malaysia melakukan pergeseran Markas Laut Wilayah II (Armada II) dari Pulau Labuan ke wilayah Sepanggar di Serawak dan membangun Markas Pasukan Komando Khusus Angkatan Laut Malaysia (PASKAL) di Pangkalan TLDM (Tentera Laut Diraja Malaysia) Semporna, Sabah (dekat Tawao). Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia telah memobilisasi kekuatan pasukannya dalam jumlah besar ke wilayah Timur Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia. *Joint Task Force II* (JTF-2) Malaysia yang merupakan biro gabungan sebagai kekuatan operasi gabungan khususnya di bagian Timur Sabah. Konsep operasi dari JTF-2 adalah untuk mempertahankan pulau-pulau strategis dan non strategis dengan pelaksanaan operasi secara terpadu antara Tentera Darat Diraja Malaysia (TDDM), Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), Tentera Udara Diraja Malaysia (TUMD) dan Polisi Diraja Malaysia (PDM) serta Badan-Badan Pemerintah lainnya. Konflik batas wilayah laut antara Indonesia - Malaysia dalam hal klaim Blok Ambalat dengan ditandai adanya pembentukan JTF-2 di wilayah Serawak, Malaysia Timur.

2. Terjadinya beberapa kali pelanggaran perbatasan laut di wilayah Blok Ambalat oleh Kapal-Kapal Perang Malaysia sebagai upaya provokasi terhadap kedaulatan negara RI.
3. Persoalan belum tuntasnya 10 titik batas darat RI-Malaysia ditandai dengan adanya pergeseran satuan Divisi Mekanis ke wilayah perbatasan dan perekrutan Askar Wathaniah.
4. Peningkatan kekuatan satuan Tank Angkatan Darat Diraja Malasia untuk memperkuat kekuatan disepanjang wilayah perbatasan di Kalimantan.



Gambar 4.7 Kekuatan TDM di Perbatasan Kalimantan



Gambar 4.8 Tank MBT PT-91M Twardy, Kanon Kal.125 mm, buatan Polandia.

Peta kekuatan satuan Ranpur Berba (Tank/Panser) Angkatan Darat Malaysia yaitu :

- a. Ranpur penggempur (48 unit Tank MBT PT-91M Twardy Kanon Kal.125 mm, buatan Polandia, 26 unit Tank FV101 Scorpion Kanon Kal. 90mm, buatan Inggris dan 184 unit Panser Sibmas 90 Kanon Kal. 90mm, buatan Belgia).
- b. Ranpur PC/IFV (452 unit Panser APC Condor buatan Jerman, 150 unit APC LAV-150 Comando buatan USA, 25 unit Tank FV4333 Stormer buatan Inggris, 98 unit Tank APC K-200A buatan Korea Selatan dan 120 unit Tank IFV ACV300 Adnan – Bushmaster serta 77 unit Tank IFV ACV300 Adnan – AGL buatan Turkey).

- c. Ranpur Intai (140 AML-60/AML-90, 92 unit Panser Ferret 60 mod. Buatan Inggris dan 82 unit SIBMAS buatan Belgia).

4.1.2.4 Kondisi Infrastruktur.

Terbatasnya infrastruktur jalan dalam kawasan perbatasan. Keterbatasan jalan terlihat dari banyaknya perkampungan yang terisolasi karena belum tersentuh pembangunan jalan. Tidak hanya hubungan antarkampung atau desa, hubungan antar kecamatan pun masih belum terbuka seperti dari Kecamatan Badau ke Kecamatan Puring Kencana yang tidak mempunyai jalan langsung. Warga Badau yang bermaksud pergi ke Puring Kencana harus pergi ke luar negeri terlebih dahulu yakni Distrik Lubok Antu di Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur sejauh 10 km. Dari Lubok Antu kemudian masuk lagi ke wilayah Indonesia yakni Desa Kantuk Asam, desa terdekat di Puring Kencana sejauh 19 km. Untuk mencapai kantor Kecamatan Puring Kencana belum ada jalan untuk roda empat.

Keterbatasan infrastruktur ini terlihat dari orientasi kegiatan masyarakat yang bergerak menuju Malaysia, karena infrastruktur jalan yang tersedia dengan cukup baik yang menghubungkan kedua negara tersebut. Kondisi ini dapat dilihat di perbatasan Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dengan Biawak Sarawak. Di perbatasan ini hanya bisa dilewati kendaraan roda empat dan warga yang memerlukan kebutuhan sehari-hari harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke Biawak. Namun, pada pertengahan tahun 2013 warga Sajingan Besar sudah bisa menggunakan sepeda motor dan mobil untuk melewati perbatasan kedua negara tersebut.

Hal lain yang terlihat kontras adalah keberadaan jalan untuk sampai di Kecamatan Sajingan Besar dari Sambas yang memiliki jarak 90 km dimana jalannya masih berupa tanah dan lumpur, dan

untuk sampai ke tempat dibutuhkan waktu 5 jam. Sedangkan kondisi yang berbeda dengan kehidupan warga desa tetangga yang masuk wilayah Sarawak, Malaysia Timur, seperti Biawak. Kampung yang terletak sekitar 75 kilometer dari Kuching, ibu kota Sarawak ini, justru jalan-jalan di permukimannya sudah beraspal mulus.

Sedangkan untuk warga perbatasan Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, dan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, kekurangan infrastruktur ini membuat warga sangat tergantung kepada kegiatan ekonomi di Malaysia. Di Badau, misalnya, warga sebenarnya bisa menjual hasil pertanian ke Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu namun karena jalan Putussibau-Badau sekitar 180 kilometer mengalami kerusakan yang sangat berat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Badau harus ke Lubok Anto, Sarawak.

Tingginya biaya akibat keterbatasan infrastruktur transportasi. Terbatasnya jalan di daerah perbatasan ini dapat mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi, baik itu ongkos ataupun waktu tempuh. Misalnya saja, berdasarkan dari informasi yang diperoleh, dari Kabupaten Kapuas Hulu, di Kecamatan Putussibau, dari Pontianak harus menempuh jarak yang mencapai 657 km dengan kondisi jalan rusak berat, khususnya pada jalur Sintang-Putussibau. Kalau menggunakan jalur sungai, jaraknya malah mencapai 842 km dan butuh waktu sehari-hari. Persoalan makin ruwet karena kalau musim hujan jalan becek dan tidak bisa dilalui, sementara pada musim kemarau air sungai susut dan perjalanan melalui sungai sangat terhambat. Penerbangan tersedia empat kali seminggu menggunakan pesawat milik PT. Dirgantara Air Service (DAS) berkapasitas sembilan penumpang, sehingga para pejabat Kalbar yang akan ke Putussibau menggunakan jalur Pontianak-Entikong-Kuching-Brunei Darussalam dan kembali masuk ke Indonesia di Putussibau.

Warga Kapuas Hulu yang tinggal di perbatasan bahkan lebih sengsara lagi. Untuk ke ibu kota Kabupaten, mereka harus menempuh perjalanan sepanjang 175 km dengan kondisi jalan rusak berat. Ongkosnya yang diperlukan lebih dari Rp 100.000 jika lancar, tetapi kalau kendaraan mengalami gangguan, terpaksa menginap di tengah hutan. Sedangkan untuk ke ibu kota propinsi di Pontianak, mereka harus menempuh perjalanan sepanjang 1.000 km.

Terbatasnya prasarana telepon dan listrik. Minimnya prasarana telepon ini menghambat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan yang aktivitas sosial dan ekonominya sangat tergantung pada lalu lintas pelayaran melalui Sungai Sambas, Sungai Sajingan, Sungai Bemban, dan Sungai Paloh.

Terbatasnya prasarana listrik juga menjadi salah satu permasalahan infrastruktur di kawasan perbatasan. Misalnya saja yang terjadi di Kecamatan Sajingan Besar dimana listrik hanya menyala selama 12 jam pada malam hari dengan pasokan terbatas. Hanya 240 rumah yang bisa menikmati fasilitas listrik. Mesin pembangkit listrik tenaga air mikro berkeuatan 60 kilowatt yang seharusnya dapat melayani penduduk Kecamatan Sajingan Besar, sudah tidak berfungsi karena rusak. Kondisi yang kontras dapat dilihat di kampung Biawak, Malaysia, karena warganya bisa menikmati fasilitas seperti bus, telepon, air bersih, dan listrik yang sangat memadai.

Kurang tersedianya sarana pendidikan di kawasan perbatasan. Kualitas SDM merupakan salah satu elemen penting dalam mengembangkan suatu wilayah. Peningkatan kualitas SDM harus didukung ketersediaan fasilitas pendidikan. Misalnya di wilayah Puring Kencana terdapat 11 gedung sekolah dasar (SD) dan sebagian besar hanya memiliki satu tenaga guru. Jika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan formal berikutnya usai tamat SD harus menuju Semitau atau Lubok Antu, Seri Aman, dan kota terdekat lainnya di Sarawak.

Jumlah penduduk Kecamatan Puring Kencana 31.000 jiwa (738 KK) dengan luas 454,55 km² dengan empat desa dan delapan dusun.

4.1.2.4.1. Kondisi Jalan.

1. Status jalan menurut status tahun 2013 tercatat 6.147,93 km yang terdiri dari :

- a. Jalan Negara = 1.575,32 km.
- b. Jalan Provinsi = 1.517,93 km.
- c. Jalan Kabupaten/Kotamadya = 4.630 km.

2. Status jalan menurut fungsi.

- a. Jalan arteri sepanjang 411,780 km meliputi Singkawang - Mempawah - Sidas - Sanggau dan Pontianak - Singkawang.
- b. Jalan kolektor sepanjang 2.489,570 km meliputi Singkawang - Sambas - Kartiasa, Singkawang - Bengkayang - Sanggau, Teluk Batang - Ketapang - Kendawangan, Sukadana - Nanga Tayap - Sengkuang.

3. Status jalan menurut kondisi Jalan.

- a. Jalan aspal meliputi Pontianak - Singkawang - Pemangkat - Sambas, Singkawang - Bengkayang - Sgu Ledo, Pontianak - Sanggau - Entikong – Sintang – Nanga Pinoh – Putussibau – Nanga Badau.
- b. Jalan pengerasan meliputi Sambas - Bengkayang - Seluas, Sintang - Nanga Pinoh, Sukadana - Ketapang - Kendawangan, Sukadana - Sengkuang.
- c. Jalan rintangan meliputi rencana jalan mulai dari liku dan Seluas jalan tembus ke perbatasan, jalan sepanjang lereng pegunungan diperbatasan melalui

Balai Karang, Senaning - Badau - Benua Martinus - Putussibau - Sintang.

4. Kelebaran jalan.
 - a. Jalan Negara dan Jalan Propinsi memiliki kelebaran jalan rata-rata antara 10 – 12 meter.
 - b. Jalan Kabupaten/Kotamadya memiliki kelebaran jalan rata-rata antara 6 – 8 meter.

4.1.2.4.2. Kondisi Jembatan dan Sungai.

1. Wilayah Kalimantan Barat dengan kondisi geografis terdapat ratusan sungai besar dan kecil antara lain S. Kapuas terpanjang di Indonesia (1.086 Km) yang dapat dilayari \pm 942 Km, S.Melawi sepanjang (471 Km), S Pawan (197 Km), S Kendawangan (128 Km), S. Jelai (135 Km), S Sekadau 117 Km), S. Sambas (233 Km), S Landak (1178) dan lainnya.
2. Kondisi jembatan.
 - a. PONTIANAK–MEMPAWAH berjarak \pm 75 km melalui jalan propinsi melewati 2 jembatan besar yang melalui sungai Kapuas Kecil dan sungai Landak dengan panjang jembatan \pm 75-125 meter dan 12 jembatan dengan panjang 25-65 meter, bisa dilalui oleh Truk Tronton dengan muatan penuh.
 - b. MEMPAWAH-SINGKAWANG berjarak \pm 85 km melalui jalan propinsi dengan melalui 11 jembatan dengan panjang 25-65 meter, bisa dilalui oleh Truk Tronton dengan muatan penuh.

- c. MEMPAWAH–BENGKAYANG berjarak \pm 125 km melalui jalan propinsi dengan melalui 18 jembatan panjang 25-65 meter, bisa dilalui oleh Truk Tronton dengan muatan penuh.
- d. BENGKAYANG–TAGOI BABANG (Perbatasan) berjarak \pm 135 km melalui jalan propinsi dengan melalui 17 jembatan panjang 25-65 meter bisa dilalui oleh Truk Troton dengan muatan penuh.
- e. BENGKAYANG–SINGKAWANG berjarak \pm 90 km melalui jalan propinsi melewati 9 jembatan panjang 25-65 meter, bisa dilalui oleh Truk tronton bermuatan penuh.
- f. SINGKAWANG–SAMBAS berjarak \pm 95 km melalui jalan propinsi dengan 14 jembatan panjang 25-65 meter, bisa dilalui oleh Truk Tronton bermuatan penuh.
- g. BENGKAYANG–SANGGAU berjarak \pm 275 km melalui jalan propinsi dengan 27 jembatan panjang 25-125 meter, bisa dilalui oleh Truk Tronton dengan muatan penuh.
- h. SANGGAU–ENTIKONG (Perbatasan) berjarak \pm 135 km melalui jalan propinsi dengan 13 jembatan panjang 25-75 meter, bisa dilalui oleh Truk Tronton dengan muatan penuh.
- j. BENGKAYANG – KAPUAS HULU/PUTUSIBAU berjarak \pm 535 km melalui jalan propinsi dengan 4 jembatan panjang 75-150 meter (Sungai Kapuas) dan 58 jembatan panjang 25-65 meter, bisa dilalui oleh Truk Tronton dengan muatan penuh.

k. PUTUSIBAU–BADAU (Perbatasan) berjarak \pm 175 km melalui jalan propinsi dengan 19 jembatan panjang 25-75 meter, bisa dilalui oleh Truk Tronton dengan muatan penuh.

4.1.3. Kondisi Gelar.

4.1.3.1. Persepsi masyarakat Kalimantan Barat.

Responden adalah Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Mempawah, Wakil Ketua DPRD TK I Kalimantan Barat, Kepala Bapeda Kalimantan Barat, Kepala Dinas Kimpraswil Kalimantan Barat, Kepala Pelabuhan Pontianak, Tokoh Masyarakat Pontianak, Perwakilan Mahasiswa dan Tokoh Agama. Wawancara dan kuesioner pada dasarnya menanyakan seberapa jauh peran Satuan Kavaleri yang ada saat ini, bagaimana bila di Mempawah yang sedang di bangun Bataliyon Kavaleri di isi dengan Kendaraan Tempur MBT Leopard RI. Kelompok pertanyaan komponen utama terdiri dari:

- a. Menciptakan stabilitas Keamanan.
- b. Daya Tangkal/Deterrence Effect.
- c. Mengamankan batas Negara.
- d. Mencegah Pelintas Batas.
- e. Pembinaan Masyarakat.

Secara umum Responden Pemda memandang peran Satuan Kavaleri penting,. Pemda memandang peran satuan Kavaleri dalam menjaga perbatasan sudah sangat baik, namun belum optimal hal ini bila dilihat dari materiil yang dimiliki dengan materiill yang dimiliki oleh negara tetangga kita Malaysia. Pemda memandang peran satuan Kavaleri dalam ikut membina masyarakat sangat besar . Namun demikian, dari aspek menciptakan stabilitas keamanan dan mencegah pelintas batas, responden Pemda masih menilai baru pada tahap cukup.

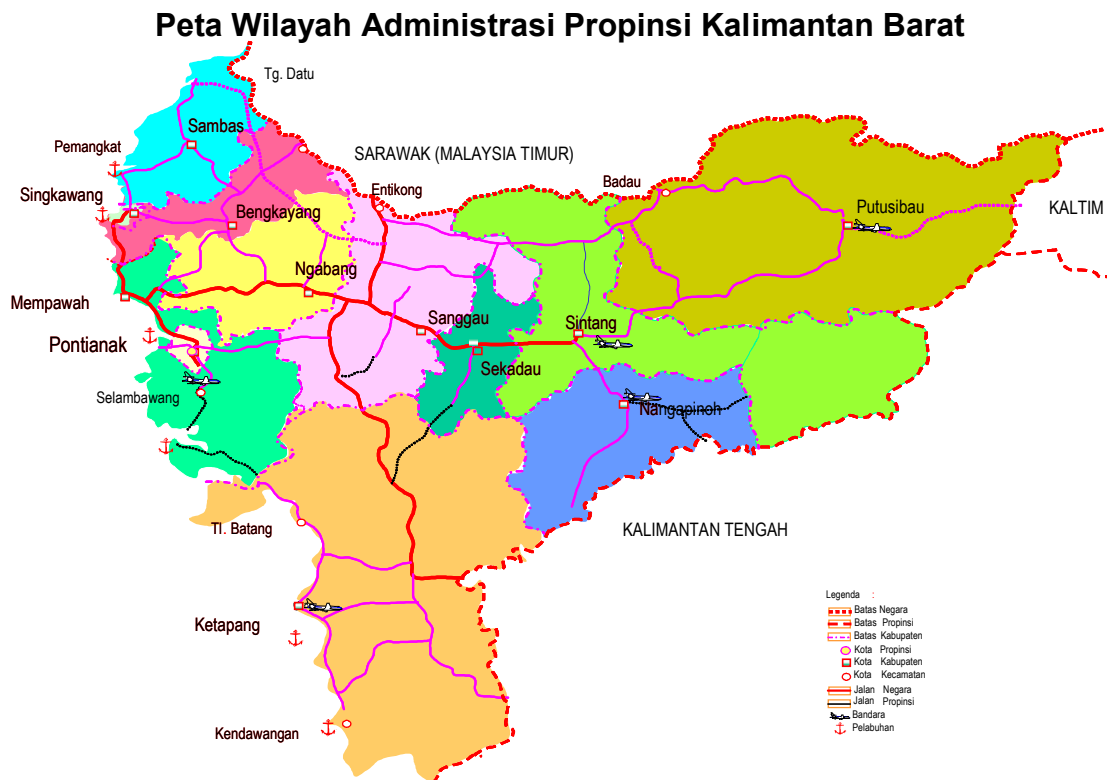
Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat, mengatakan bahwa sudah saatnya Kalimantan Barat di dukung dengan kendaraan Tempur MBT Leopard RI. Kalau kita lihat sekarang kendaraan Tempur Malaysia sudah melaksanakan latihan manuver dan latihan menembak di perbatasan, hal ini menunjukkan bahwa secara materiil Malaysia lebih siap ketimbang kita. Masalah infrastruktur saya kira tidak menjadi masalah, kedepan kita perlu membangun jalan dan jembatan yang mampu di lalui kendaraan Tronton maupun Kendaraan Tempur. Perlu sinergitas dan kerja sama dengan TNI untuk pembangunan sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh TNI sekaligus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengadakan TMMD atau Kerja sama dalam bentuk yang lain. NKRI Harga Mati jangan hanya menjadi slogan saja tapi impelementasikan di lapangan, antara lain ya dengan membangun daerah perbatasan yang kuat, kata Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat tersebut.

Sementara dari Gubernur Kalimantan Barat, menyampaikan bahwa MBT Leopard adalah Tank Berat dengan berat beban mencapai kurang lebih 60 Ton. Dihadapkan dengan kondisi geografi Kalimantan Barat yang pada umumnya merupakan lahan gambut tentu akan menjadi masalah. MBT Leopard memang sangat di butuhkan, namun kita harus menyiapkan terlebih dahulu infrastruktur yang mendukung agar nantinya tidak menjadi masalah dalam pengoperasionalnya.

4.1.3.2. Kondisi Fisik Geografi.

Propinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25/1956 dengan Kota Pontianak sebagai ibukota Propinsi meliputi 1 kota dan 9 Kabupaten. Sejak diterapkannya otonomi daerah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten/kota menjadi 12 yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak,

Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Melawi.



Gambar 4.8 Peta Administrasi Kalimantan Barat

Keadaan topografi wilayah perbatasan bervariasi, dari yang datar (slope 0-3%), bergelombang (slope 3–8%), berbukit (slope 15-25%) sampai curam (slope >40%). Topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat, wilayah datarnya sangat terbatas dan berada tidak jauh dari pantai atau daerah aliran sungai.,

1. Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara asing yaitu Serawak, Malaysia Timur, adalah merupakan akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing karena Kalimantan Barat dan Serawak telah terbuka jalan darat antar negara (Pontianak Entikong – Kuching Serawak Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.
2. Wilayah Kalimantan Barat meliputi : Daratan = 110.000 km², Laut = 6.807 km². Rawa = 30.000 km².
3. Dataran rendah yang luas maka ketinggian gunung relatif rendah serta non aktif yang paling tinggi gunung Baturaya dikecamatan Serawai Kabupaten Sintang dengan ketinggian 2.278 M dari permukaan laut, gunung Lawit yang berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu dengan ketinggian 1.767 M dan gunung Batusambung dikecamatan Ambalau dengan ketinggian mencapai 1.770 M.
4. Sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Barat adalah untuk hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34.11%), areal hutan terbesar di Kab. Kapuas Hulu dengan luas 1.964.491 Ha sedangkan padang/semak terbesar di Kab. Ketapang seluas 1.374.145 Ha dan sementara untuk areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 Ha atau 10,73 % sedangkan areal pemukiman berkisar 0.83 % yang terluas di Kab Sintang, Sanggau dan Kab Ketapang.

Hasil utama Provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Sektor lain yang sedang berkembang adalah agrikultur, kehutanan dan perikanan, serta turisme. Sektor industri dan perdagangan banyak berkembang di kota-kota, khususnya di Ibukota Kabupaten/Kota. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu

pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua Kabupaten/Kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang adalah sungai Mahakam.

Karakteristik iklim Provinsi Kaltim termasuk iklim Tropika Humida dengan curah hujan berkisar antara 1.500-4.500 mm/tahun. Temperatur udara rata-rata 26° C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 5° - 7° C, temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai Januari sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan Juli sampai Agustus. Kecepatan angin rata-rata 5 knot per jam. Daerah beriklim seperti ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau, meskipun pada saat tertentu terjadi penyimpangan iklim sehingga terjadi kemarau panjang seperti pada tahun 1972, 1982, dan tahun 1997. Pada musim Angin Barat hujan turun sekitar bulan Agustus sampai Maret, sedangkan pada musim angin Timur hujan relatif kurang, terjadi sekitar bulan April sampai September.

Kalimantan Barat yang beriklim tropis basah mempunyai kondisi iklim yang spesifik dibandingkan wilayah Indonesia pada umumnya, hujan turun tersebar merata sepanjang tahun. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun diselingi musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di khatulistiwa maka iklim Kaltim dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober. Namun pada tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Barat tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau bahkan terjadi hujan.

4.1.3.3. Kondisi Masyarakat Kalimantan Barat.

Secara demografis, jumlah penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2012 berjumlah 3.750.369 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,68%. Pola persebaran penduduk tidak merata dengan konsentrasi penduduk di kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi sehingga menyebabkan ketimpangan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yang berimplikasi pada terjadinya perbedaan kepadatan penduduk antardaerah Kabupaten/Kota.

Secara etnis, Kalimantan Barat memiliki beberapa macam suku bangsa yang selama ini dikenal masyarakat luas suku yang dominan adalah suku Dayak. Suku Dayak yang ada sekarang ini bukan merupakan suku asli Kalimantan, melainkan suku luar yang sudah banyak terpengaruh oleh suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari penamaan gelar kebangsawanan yang menggunakan kata Andi. Jadi sesuai dengan studi-studi yang dilakukan, suku Kutai yang asli sebenarnya sudah tidak terwakili lagi karena suku Kutai yang asli beragama Hindu dan memiliki tata cara kehidupan yang sangat berbeda dengan suku Kutai saat ini. Hal ini berbeda dengan suku Dayak yang sampai dengan sekarang memiliki kekhasan Kalimantan dalam setiap aspek kehidupan mereka (tarian, bahasa, pola hidup, dan lain-lain).

4.2. Pembahasan.

4.2.1 Postur Satuan Kavaleri TNI AD.

Undang-Undang RI No 3 tahun 2002, dalam hidup bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar dan atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan

keberadaannya. Dari pandangan tersebut diatas, bangsa Indonesia menyelenggarakan pertahanan negara dengan bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Sistem Pertahanan Negara dipahami sebagai bagian dari paradigma Keamanan Nasional (*National Security*), bukan hanya berarti mempertahankan negara dari isu-isu keamanan tradisional yang mengancam kedaulatan politik dan teritorial negara (*State Security*), tetapi juga isu-isu keamanan baru yang dapat mengancam kehidupan warga negara (*Human Security*),

Kesiapan TNI-AD di perbatasan darat Indonesi-Malaysia di Kalimantan Barat, harus diwujudkan melalui berbagai upaya pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat yang diarahkan pada terwujudnya kualitas pembinaan postur TNI-AD di perbatasan yang menghasilkan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan pertahanan matra darat yang adaptif dan menentukan (*decisive*) dalam penggunaan kekuatan untuk menghadapi berbagai skenario ancaman yang paling mungkin. Penyesuaian postur yang adaptif merupakan respon TNI-AD agar mampu melaksanakan tugas-tugas saat ini dan masa depan dengan cara melakukan peningkatan dan penyesuaian doktrin, organisasi, SDM, pendidikan dan pelatihan, latihan, fasilitas, peranti lunak, materiil dan Alutsista, dan kepemimpinan. Pembinaan postur TNI-AD di perbatsandarat Indonesia-Malaysia, bertujuan untuk mewujudkan totalitas kekuatan, kemampuan dan gelar sebagai kekuatan penangkal yang mampu mendukung terselenggaranya strategi penangkalan dengan cara penolakan (*denial*) sebagai landasan untuk menuju strategi penangkalan dengan cara pembalasan (*reprisal*). Strategi ini digunakan sebagai kekuatan penangkal, penindak dan pemulih yang tangguh diwujudkan melalui kekuatan pertahanan matra darat yang menentukan (*decisive*).

Satuan Kavaleri TNI AD yang ada saat ini yaitu Denkav 2/Pontianak yang dilengkapi dengan Alut Sistikav Tank AMX 13, Panser Saladin, Saracen dan Anoa tidak optimal dalam melaksanakan Tugas Pokoknya. Apalagi Malaysia di dukung dengan PT-91 Twardy buatan Polandia yang memiliki bobot 50 ton dan termasuk Kendaraan Tempur yang canggih di kelasnyadan sudah siap di perbatasan. TNI AD membutuhkan Kekuatan Satuan Kavaleri TNI AD yang siap operasional, handal, tangguh dan modern selain dibutuhkan untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang mungkin timbul, juga akan menjadi efek penangkal (*deterrent effect*) dan memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) bagi pihak-pihak asing yang berniat melaksanakan konfrontasi dengan Negara Indonesia.

4.2.2 Kekuatan Satuan Kavaleri TNI AD.

Kekuatan pertahanan matra darat di perbatasan darat Indonesia-Malaysia, ditujukan pada peningkatan kemampuan, kekuatan dan gelar bagi satuan Kodam XII/Tpr untuk dapat dimobilisasi ke seluruh wilayah tanggung jawab Kodam XII/Tpr. Kodam sebagai kompartemen strategis harus memiliki daya tangkal yang kuat dengan meningkatkan kemampuan, kekuatan dan gelar satuan sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang mungkin timbul.

Menurut Dr.Kusnanto Anggoro pengamat politik dan militer, peneliti senior pada *Centre For Strategic and International Studies* (CSIS), dalam tulisan *Istana, Cilangkap dan Senayan* , menyatakan bahwa peran TNI dalam kehidupan bangsa dalam keadaan apapun hubungan antara TNI dan Politik terpengaruh oleh Diktum Clausewitzian. Menurut Anggoro, Khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat, sangat kuat tertanam Diktum Clausewitzian bahwa “ Perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain “.

Clausewitz mendefenisikan strategi sebagai penggunaan pertempuran untuk mendapat tujuan akhir dari perang, Clausewitz

membedakannya dengan taktik yang berarti seni untuk mempergunakan pasukan-pasukan dalam pertempuran. Clausewitz percaya bahwa pertempuran adalah segalanya, dan menaklukkan angkatan perang musuh merupakan tujuan yang tepat dan merupakan jalan menuju kemenangan. Clausewitz menganut teori pendekatan langsung. Yakni pendekatan yang menekankan bahwa kemenangan hanya dapat diwujudkan dengan membuat musuh tidak berdaya, menghancurkan kekuatan militernya, merebut negerinya dan menaklukkan kemauannya untuk melawan dan ini hanya dapat dicapai melalui pertempuran.

Lain dari pada itu Yudha Bakti Ardiwisastra dalam bukunya "*Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*" mengatakan, "Bahwa dalam perkembangannya, pengertian kedaulatan mengalami berbagai perubahan, dimana negara dikatakan berdaulat apabila negara tersebut mampu dan berhak mengatur serta mengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam negeri dan luar negerinya, dengan tidak bergantung kepada negara lainnya".

Dalam tulisan yang lain Mochtar Kusmaatmaja menambahkan "Bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, dimana negara tersebut berdaulat, tapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian".

Pengertian secara akademis, perang adalah konflik berskala besar yang terjadi di dalam atau di luar negeri bila terkait dengan masalah kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Semesta dijelaskan dalam Doktrin Pertahanan negara sebagai pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Dari pengertian kata perang dan semesta maka dapat dipahami bahwa perang semesta:

- (1) Tidak harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara militer, seperti misalnya bertempur dengan menggunakan senjata api;
- (2) Pelibatan rakyat dalam perang tidak harus dengan mempersenjatai secara fisik dan memperankannya sebagai kekuatan tempur bersenjata atau kombatan;
- (3) Mengingat ancaman terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia tidak hanya berasal dari kekuatan militer “luar negeri” (*Negara lain*), tetapi juga bisa berasal dari kelompok di dalam negeri (*sparatis*), maka perang semesta dapat terjadi ketika berhadapan dengan kelompok sparatis.

Penggunaan kekuatan TNI-AD melibatkan kekuatan pertahanan militer secara total dalam bentuk kekuatan penangkalan dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh. Keterpaduan antara fungsi harus serasi dan seimbang sesuai dengan peran fungsi masing-masing. Totalitas pertahanan matra darat berprinsip pada kesemestaan, sehingga sinergitas antar fungsi-fungsi merupakan keutamaan pendayagunaan kekuatan matra darat dalam kerangka pertahanan militer. Selain itu memberikan petunjuk bagi satuan-satuan operasional di lapangan, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pembelaan diri (*self defense*) yang memperbolehkan para komandan bertindak sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai atau menyelesaikan tugas-tugasnya di dalam batas-batas kebijaksanaan nasional (*national policy*) yang telah ditetapkan.

Di Kalimantan Barat Organisasi kekuatan Kewilayahan terdiri dari Makodam:

- (1) Makodam-XII/Tpr dan Balakdam-XII/TPR di Pontianak;
- (2) Denkav-2 di Pontianak;
- (3) Denzipur-6 di Mempawah;

- (4) Yon Armed 16/15 M/Tarik di Ngabang;
- (5) Makorem 121/ABW di Pontianak Terdiri dari:
 - (a) 7 Kodim, 1201/MPW, 1202/SKW, 1203/KTP, 1204/SGM, 105/STG, 1206/PSH dan 1207/PTH
 - (b) 112 Koramil
 - (c) yonif 643/WNS di Mempawah
- (6) Mabrigif-19/KH di Singkawang
 - (a) Yonif 641/BSM di Singkawang
 - (b) Yonif 642/KPS di Sintang
 - (c) yonif 644/WS di Putusibau.

Bila dihadapkan dengan Malaysia yang sudah diperkuat dengan Tank PT 91 Twardy buatan Polandia dengan kekuatan 1 Batalyon, satuan Kavaleri yang ada saat ini yaitu Detasemen Kavaleri 2/Pontiank, dengan kekuatan 1 Detasemen kavaleri dan dilengkapi dengan Ranpur yang rata-rata sudah relatif tua tidak optimal dan tidak mampu menghadapi lawan serta tidak memiliki daya tangkal yang efektif. Pengorganisasian kekuatan pertahanan harus didasarkan pada konsep pemikiran tertentu. Pengorganisasian kekuatan pertahanan negara yang satu berbeda dari negara yang lain, karena masing-masing memiliki dasar pemikiran yang tidak selalu sama. Dasar pemikiran itu dipengaruhi oleh dasar negara atau pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*). Bagi bangsa Indonesia, dengan dasar negara Pancasila, perang hanya dilakukan kalau diperangi atau diserang bangsa lain.

Sejalan dengan pemikiran tersebut diatas dan dihadapkan pada teori yang ada maka perlu adanya penambahan kekuatan satuan kavaleri yang ada di Kalimantan Barat minimal 1 Batalyon. Adanya rencana pembentukan Batalyon Kavaleri di Mempawah Kalimantan Barat dapat menjawab pertanyaan tersebut. Ranpur yang dapat

disandingkan dan memiliki daya tangkal yang baik adalah Ranpur MBT Leopard.

4.2.3 Kemampuan Satuan Kavaleri TNI AD.

Pembinaan kemampuan kekuatan pertahanan matra darat bertujuan untuk menciptakan efek tangkal di darat yang merupakan sinergitas antara pertahanan militer dengan kemampuan pertahanan nirmiliter baik dalam rangka tugas OMP maupun OMSP. Satuan kavaleri yang ada saat ini (Detasemen kavaleri 2/ Pontianak), kemampuannya tidak optimal bila dihadapkan pada tugas pokok dan luasnya wilayah tanggung jawab yang harus di kover .

Ada 2 hal yang dapat dianalisa, sebagai berikut :

1. Kemampuan yang dimiliki oleh satuan Detasemen kavaleri 2/Pontianak dapat dijabarkan dari fungsi utama yang dimiliki satuan baik fungsi penggempur maupun fungsi pengamanan. Sebagai satuan Kavaleri TNI AD yang memiliki daya gerak yang tinggi, daya tembak yang dahsyat dan daya kejut yang ampuh serta perlindungan lapis baja, Detasemen kavaleri 2/Pontianak kurang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pertempuran yang menentukan, mampu menghancurkan Berba musuh, mampu melaksanakan eksploitasi dan pengejaran, mampu melaksanakan penerobosan yang dalam dan pelambungan yang lebar, mampu dikerahkan dalam operasi lawan insurjensi serta mampu melaksanakan pengamanan terhadap suatu obyek atau terhadap operasi satuan yang lebih besar. Hal ini disebabkan Ranpur yang dimiliki oleh Detasemen Kavaleri 2/Pontianak yaitu Ranpur Panser Saladin, Saracen dan Feret buatan Inggris tahun 1960 an serta Ranpur Tank Amx 13 buatan Perancis tahun 1960 an yang sudah relatif tua sehingga

kemampuan mobilitasnya menurun. Apalagi bila dihadapkan pada luasnya wilayah yang harus di kover dan saat ini Malaysia sudah menggelar di perbatasan Kalimantan Barat yaitu Tank PT 91Twardy buatan Polandia dengan berat 50 ton dan merupakan MBT yang cukup canggih di kelasnya.

2. Ranpur yang di miliki satuan Detasemen Kavaleri 2/Pontianak memiliki keterbatasan kemampuan yang dipengaruhi oleh keadaan medan (rawa, sungai, jurang/medan terpotong-potong dan hutan) yang dihadapi, memiliki kerawanan terhadap serangan udara mengingat jenis persenjataan yang dimiliki tidak berspesifikasi sebagai senjata penangkis serangan udara (PSU) dan dalam manuvernya sangat tergantung

Sesuai kondisi yang berkembang saat ini, kemampuan satuan Detasemen kavaleri 2/Pontianak sudah tidak optimal lagi dan perlu di dukung oleh Satuan Kavaleri TNI AD yang tangguh, handal dan memiliki mobilitas yang tinggi di dukung sarana komunikasi yang luas. Bila dilihat dari Ranpur yang dimiliki oleh satuan kavaleri TNI AD saat ini, dihadapkan pada luasnya wilayah tanggung jawab dan ancaman yang mungkin timbul maka mengerucut pada MBT Leopard. Penggunaan Ranpur kelas berat MBT Leopard dengan aplikasi teknologi terkini akan berdampak padapeningkatan sumber daya manusia prajurit TNI AD, sehingga melalui penguasaan dan pemahaman aplikasi teknologi militer tersebut akan mampu mensejajarkan prajurit TNI AD dengan prajurit Angkatan Darat negara-negara lain. Ranpur ini dirancang memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi dengan sistem penggerak roda rantai (*Track Link*) dengan tenaga gerak sangat kuat dan tekanan jejak yang sangat kecil serta kemampuan mengarung (*Fording*) di sungai pada kedalaman tertentu, memberikan kemampuan dapat bermanuver dengan baik di medan

off-road dengan permukaan tanah yang relatif lunak/berlumpur sekalipun termasuk di medan berpasir, serta mampu mengarung sungai yang memiliki kedalaman rata-rata dibawah 4 meter dengan dasar sungai yang relatif cukup keras. Selain itu dengan memiliki Ranpur MBT Leopard RI, maka prajurit Kavaleri TNI AD akan siap melaksanakan tugas-tugas operasi militer darat maupun melakukan kegiatan latihan bersama dengan negara-negara lain, baik dalam forum kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral yang sudah berjalan sampai dengan saat ini dengan penuh kebanggaan, karena Ranpur MBT Leopard RI merupakan salah satu Ranpur MBT terbaik di dunia saat ini.

Pembinaan SDM prajurit kavaleri TNI AD merupakan investasi SDM organisasi yang harus direncanakan, dipolakan, didayagunakan, dievaluasi sesuai kompetensi dan kinerja jabatan dan pekerjaan. Keberhasilan investasi ditentukan oleh pemilihan dan penggunaan personel terbaik dalam organisasi. Sehingga pembinaan SDM berpedoman pada prinsip kesukarelaan dalam upaya bela Negara, Jati diri, Nilai-nilai utama, budaya organisasi dan SDM terbaik. Untuk menghasilkan SDM kavaleri yang berkualitas, perekrutan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dari sumber terbaik. Hasil perekrutan dilanjutkan dengan pembangunan, pengembangan profesi dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan melalui preogram TOT (*Tranger of Technology*) dengn negara prodisen maupun melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Kaveleri Padalarang Bandung. Hasil didik digunakan sesuai dengan analisis jabatan dan pekerjaan berdasarkan syarat kompetensi dan deskripsi pekerjaan dan jabatannya.

Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*". Pengelompokkan ini diturunkan pada

pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: *“Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc”*. Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: *“Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*. Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: *“Financial resources- cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc”*. Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: *“Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc”*.

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : *“Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies”*. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan;

“Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed “.

“Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)

Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam

implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (Pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangani. Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi,

menurut Edward III (1980:102) yaitu :“Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi

efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103).

Dilihat dari aspek kebutuhan organisasi, dengan dibentuknya satuan Batalyon Kavaleri 12 di Mempawah Kalimantan Barat, sesuai dengan Renstra Kodam XII/Tpr dan Postur TNI AD tahun 2009 - 2014 sudah tepat dan memadai bila dihadapkan pada hakekat ancaman dan perkembangan gelar kekuatan satuan TDM (Malaysia) di utara pulau Kalimantan serta permasalahan yang belum terselesaikan di wilayah perbatasan. Dibutuhkan Ranpur yang tangguh, handal dan memiliki daya tangkal efektif di perbatasan darat Indonesia-Malaysia yaitu MBT Leopard.

Pertanyaan yang selalu timbul pada saat penempatan Ranpur MBT Leopard adalah apakah kondisi geografi di Kalimantan Barat mampu digunakan untuk manuver Ranpur MBT Leopard, seperti apa yang disangsikan oleh Gubernur Kalimantan Barat tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka menggunakan pertimbangan tekanan jejak. Secara geografis kontur tanah di wilayah Kalimantan Barat yang merupakan daerah tropis adalah lahan gambut atau tanah yang relatif lunak dan berpasir, serta memiliki sungai yang berkedalaman rata-rata dibawah 4 meter. Pada dasarnya Ranpur MBT dengan sistem penggerak menggunakan roda rantai (*Track Link*) memang didesain untuk bermanuver di segala bentuk medan sehingga tidak terikat dengan jaring jalan, disamping dengan tenaga yang sangat kuat dan tekanan jejak yang kecil memberikan kemampuan Ranpur MBT dapat bermanuver dengan baik di medan off-road dengan permukaan tanah yang relatif gempur/lunak termasuk di medan berpasir.

Pertimbangan didasarkan atas kemampuan mobilitas dan tekanan jejak yang minim serta daya dukung penampang Ranpur di atas tanah (*ground pressure*). Perhitungan tekanan jejak berdasarkan

perhitungan luas penampang dalam hal ini rantai yang menyentuh dasar untuk menahan beban Ranpur. Secara umum perhitungan tekanan jejak menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$TJ = \frac{L}{p \times l \times 2}$$

Keterangan :

TJ : Tekanan jejak dalam Kg/cm².

L : Berat Ranpur dalam Kg.

p : Panjang rantai yang menyentuh dasar dalam cm

l : Lebar rantai dalam cm

Sesuai dengan Ketentuan Standar Umum (KSU) Kavaleri TNI AD, ketentuan tekanan jejak maksimal yang diperbolehkan adalah 0,9 Kg/cm².

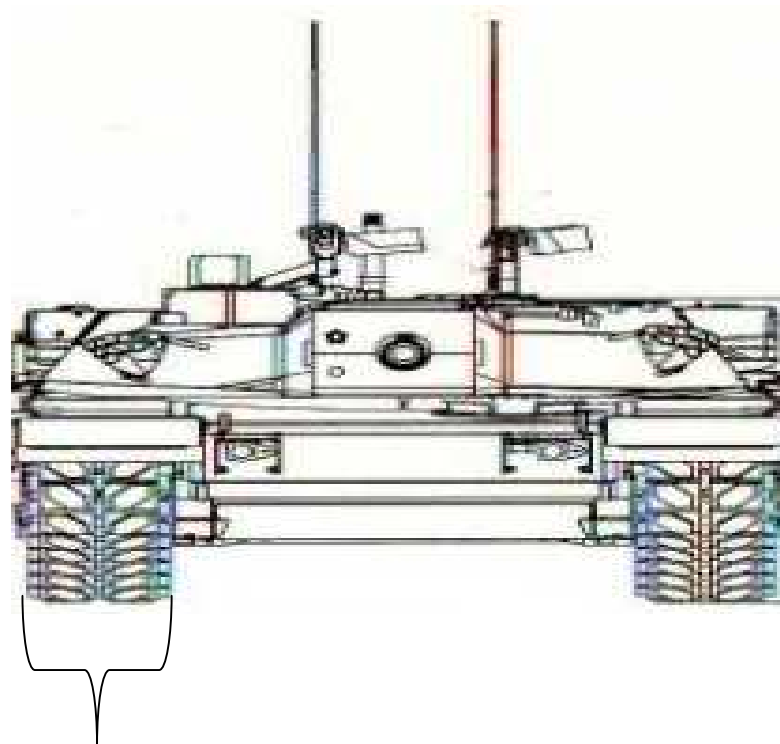
Contoh : Ranpur MBT dengan penampang rantai (5,8 m x 0,6 m) dan berat tempur Ranpur 53,2 Ton (53.200 kg).

$$\begin{aligned} \text{Luas rantai yang menapak di tanah} &= \text{Panjang} \times \text{Lebar} \times 2 \text{ (ka+ki)} \\ &= 5,8 \text{ m} \times 0,6 \text{ m} \times 2 \\ &= 6,96 \text{ m}^2 \\ &= 69.600 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

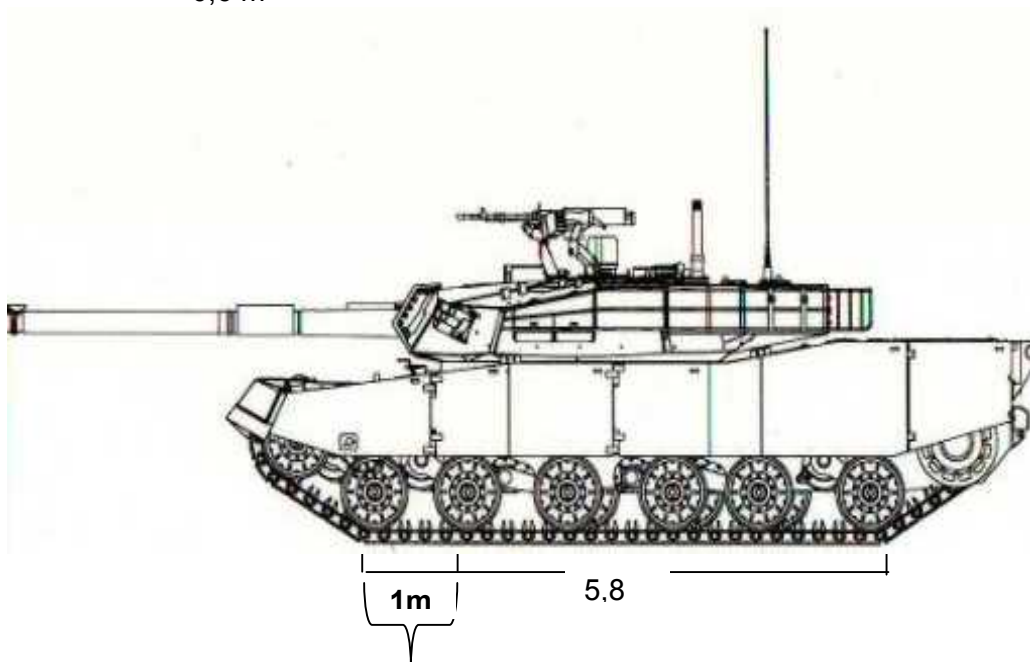
$$\begin{aligned} \text{Tekanan Jejak} &= \frac{53.200 \text{ kg}}{69.600 \text{ cm}^2} \end{aligned}$$

$$= 0,764 \text{ kg/cm}^2$$

$$= 7,64 \text{ ton/m}^2$$



0,6 m



Sehingga setiap luas 1m^2 daya tekan Ranpur ke tanah hanya 7,64 Ton



Gambar 4.11 Tekanan Jejak Ranpur MBT

Pada saat Ranpur bergerak maka Tekanan Jejaknya akan semakin kecil, sehingga Tekanan jejak Ranpur ***berbanding terbalik*** dengan kecepatan Ranpur, semakin tinggi kecepatan Ranpur maka tekanan jejaknya akan semakin kecil. Dari perhitungan tersebut, maka kondisi geografi di Kalimantan Barat sesuai data yang tersebut diatas, sangat memungkinkan untuk manuver Tank MBT leopard RI. Kemampuan infrastruktur dalam menahan berat beban Ranpur *Main Battle Tank* (MBT) akan berdampak kepada radius operasional, kemampuan dan aplikasi penggunaannya dalam taktik, dengan demikian salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap kemampuan operasional adalah kondisi permukaan daratan (tanah) dan kondisi infrastruktur yang meliputi Jalan dan Jembatan. Ranpur MBT yang dirancang memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi dengan sistem penggerak roda rantai (*Track Link*) dengan tenaga gerak sangat kuat dan tekanan jejak yang sangat kecil serta kemampuan fording (mengarung) pada kedalaman sungai tertentu, memberikan kemampuan dapat bermanuver dengan baik di medan off-road dengan permukaan tanah yang relatif lunak/berlumpur sekalipun termasuk di medan berpasir, serta mampu mengarung sungai yang memiliki kedalaman rata-rata dibawah 4 meter dengan dasar sungai yang relatif cukup keras. Namun pada kondisi diluar

batas kemampuannya maka tidak bisa berdiri sendiri yaitu akan bergantung dengan satuan pendukung baik dari unsur internal (menggunakan Ranpur Tank AVLB, Ranpur Tank Recoveri dan Tank Transporter), maupun dari unsur eksternal (Satuan Zipur untuk dukungan jembatan taktis dan satuan Bekangair untuk dukungan kapal/ferry penyeberangan sungai).

Kondisi jalan yang akan dilalui MBT harus memperhitungkan faktor kemampuan jalan, terutama lebar jalan yang minimal harus dimiliki sepanjang 6 m (4 m lebar max MBT + 2 m jarak aman ka/ki). Dalam situasi taktis maka sepanjang ada jaring jalan minimal memiliki kelebaran 6 meter maka Ranpur MBT dapat dioperasikan. Dihadapkan dengan kondisi adanya sungai-sungai maka jembatan menjadi sarana yang sangat vital. Kondisi jembatan dapat dilalui oleh Ranpur MBT harus diperhitungkan faktor kemampuan jembatan dalam menahan beban (*Pay load*) yaitu minimal 50 – 60 TON (+/- 5 TON faktor keamanan). Namun apabila kemampuan jembatan tidak mampu mendukung untuk dilintasi Ranpur MBT maka peran jembatan taktis Ranpur Tank Peluncur Jembatan (Armor Vehicle Launcher Bridge/Tank AVLB) dan jembatan taktis aset satuan Zipur dapat dimanfaatkan. Kemampuan jembatan dalam menahan beban Ranpur MBT dapat ditanggulangi dengan cara menggunakan dengan syarat lebar minimal jembatan 6 m dan panjang maksimal jembatan 20 – 25 m, dengan demikian jembatan yang ada pada Ranpur AVLB dapat dipasang diatas jembatan yang ada. Atau Jembatan Taktis AVLB atau jembatan taktis aset satuan Zipur dapat dipasang pada sisi lain dari jembatan yang ada. Untuk sungai yang memiliki kedalaman rata-rata dibawah 4 meter dengan dasar sungai yang relatif cukup keras maka dapat dilalui oleh Ranpur MBT karena mempunyai kemampuan mengarang/*fording*.

Dengan demikian dihadapkan kepada faktor infrastruktur yang ada maka kondisi jalan dan jembatan di Kalimantan Barat yang ada saat ini :Pengerahan Ranpur dapat dilaksanakan di wilayah

Kalimantan, terutama di daerah sekitar Pontianak (Kalimantan Barat) serta di daerah perkotaan yang telah memiliki jaringan jalan dan jembatan yang cukup baik dengan kemampuan lebar minimal 10 meter dan ketahanan jembatan rata – rata sampai dengan beban diatas 40 ton.

Wilayah Kalimantan Barat dipengaruhi oleh banyaknya dan panjangnya sungai-sungai besar serta rawa-rawa di dekat pantai dan hutan lebat (meskipun sebagian hutan telah dibuka) dengan kondisi tanah yang relatif cukup keras terdapat di wilayah bagian tengah dan utara Kalimantan. Di wilayah daerah dekat pantai umumnya jenis tanah yang tidak stabil dan tanah gambut, akan tetapi masih dapat dilalui MBT Leopard RI dengan menggunakan jalan keras yang telah ada.



Gambar 4.12 Ranpur AVLB untuk MBT (Tank Jembatan)

Muncul pertanyaan dalam benak kita “Kenapa MBT Leopard yang diperlukan di Kalimantan Barat”. Bila kita hadapkan dengan Malaysia yang sudah siap dengan PT 91 Twardy buatan Polandia, maka tidak ada alternatif lain untuk saat ini Kendaraan Tempur yang bisa bersaing secara kompetitif yang kita miliki adalah MBT Leopard.

Pertimbangan strategis terhadap potensi ancaman berdasarkan situasi global dan situasi regional khususnya perkembangan wilayah kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah perlu langkah strategis untuk membangun kekuatan berimbang dalam upaya peningkatan pencitraan wibawa negara dan bangsa Indonesia, dengan tujuan sebagai daya tangkal/*deterrent effect*, perbandingan daya tempur relatif yang lebih baik dengan negara tetangga, dan posisi tawar/*bargaining position* negara Indonesia di dunia Internasional. Perimbangan kekuatan militer di wilayah kawasan khususnya kekuatan satuan kavaleri Angkatan Darat negara-negara tetangga, maka sudah saatnya TNI AD perlu mempertimbangkan lebih mendalam untuk pengadaan Ranpur jenis Tank Tempur Utama atau *Main Battle Tank* (MBT)..

Berdasarkan analisa yang ditinjau dari berbagai aspek dan berbagai segi diatas, maka dapat direkomendasikan bahwa Ranpur MBT Leopard 2 sangat diperlukan oleh Kavaleri TNI AD dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki kualitas lindung lapis baja dan aplikasi body protection yang lebih baik dibandingkan dengan jenis Tank lainnya seperti *Explosive Reactif Armor/ERA* (Sistem Perlindungan Aktif dari Ledakan), *Ceramic Add on Plate* dan *Composive Protection*. Memiliki perlindungan baja sesuai *Standarization Agreement (Stanag)* NATO sampai dengan Level 5 yaitu mampu menahan serangan seluruh senjata ringan

terbaru mulai jenis Kinetic Energy sampai dengan munisi 25 mm APDS-t (M791) atau TLB 073 pada jarak 500 meters dengan kecepatan proyektil 1258 meter/detik serta dari impact ledakan tembakan Artillery sampai dengan kaliber 155 mm High Explosive pada jarak 25 meter serta Ranpur MBT mampu menahan tembakan senjata Kanon dengan kaliber sampai 40mm.

2. Memiliki daya tembak yang lebih besar, yaitu menggunakan senjata Kanon Kal. 120mm dengan Kanon Smoothbore dengan jarak tembak efektif yang cukup jauh (diatas 4.000 meter) serta yang dapat untuk menembakkan senjata *Anti Tank Guided Missile* (ATGM). Disamping itu Ranpur MBT Leopard 2 dilengkapi dengan munisi type baru yaitu DM 11 (dynamic magnetic) yang merupakan pengembangan terbaru dan canggih (belum dimiliki negara lain).
3. Memiliki tingkat akurasi tembakan yang tinggi, dilengkapi dengan sistem keseimbangan (*stabilizer*) pada sistem turret sehingga memungkinkan menembak sasaran sambil bergerak, dilengkapi dengan *Automatic Firing Control System* dan *Balistic Computer* untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam penembakan.

4.2.4 Gelar Satuan Kavaleri TNI AD.

Dalam *Theory of War and Strategy* "Human Factors in War" persyaratan gelar kekuatan adalah (1) *when there still lack of; political will and domestic support, or lock of clear ides of outcome; and (2) Then we settle on the military achieving amelioration or containment.* Atau (1) Ketika disitu tidak ada niat/keinginan politik, dukungan dalam negeri, atau tidak ada pendapat yang jelas, dan (2)

Kami akan berusaha menempatkan pencapaian perkembangan militer pada perbaikan-perbaikan.

Dari Konsep dan teoritis tentang wilayah perbatasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wilayah perbatasan dibedakan dalam dua pengertian yaitu *bouderis* adalah garis-garis yang menghubungkan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara. Sedangkan *frontiers* mewujudkan zona-zona dengan lebar yang beraneka yang memisahkan dua wilayah yang berlainan negaranya. Dijelaskan bahwa negara memiliki perbatasan yang terluar dari batas wilayahnya dan diatur pula pada zona-zona yang telah ditentukan antar negara berdasarkan hukum internasional sedangkan pada *boundary* paling tepat dipakai jika negara dipandang sebagai unit wilayah/tempat (*spatial*) yang berdaulat.
2. Wilayah perbatasan pada Teori *Karl Haushoper* tentang "*Lebensraum*" mengatakan batas wilayah perbatasan merupakan mencari tambahan tempat baru (*Living space*) dengan mencari koloni baru untuk memperluas wilayahnya. Pada Jaman Hitler menerapkan teori ini. Dengan menduduki dan menguasai wilayah-wilayah negara tetangga di Eropa dengan target pertama Austria dan Czechoslovakia. Dengan menerapkan untuk menggabungkan tiga negara menjadi satu merupakan menerapkan *Strategy Frontiers*.
3. Wilayah perbatasan dapat diartikan ruang atau tempat yang dihuni oleh dari suatu populasi/masyarakat yang berada pada satu negara dan melakukan kegiatan atau aktifitas dalam rangka memenuhi kehidupannya. Wilayah yang terpencil memiliki karakteristik khusus jumlah penduduk yang rendah, memiliki 2 mata uang yang berlaku dan kota yang melayani kedua masyarakat. Sebagai negara yang memiliki wilayah

tidak akan terlepas memiliki arti tanggung jawab untuk membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan seluruh aspek yang pada akhirnya untuk kesejahteraan dan keamanan wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang memiliki arti sangat signifikan bagi suatu negara. Oleh karenanya batas wilayah yang jelas akan memudahkan bagi kedua belah pihak yang berbatasan untuk saling koordinasi dan saling menghargai. Disamping itu juga akan memudahkan dalam pengendalian dan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran diperbatasan.

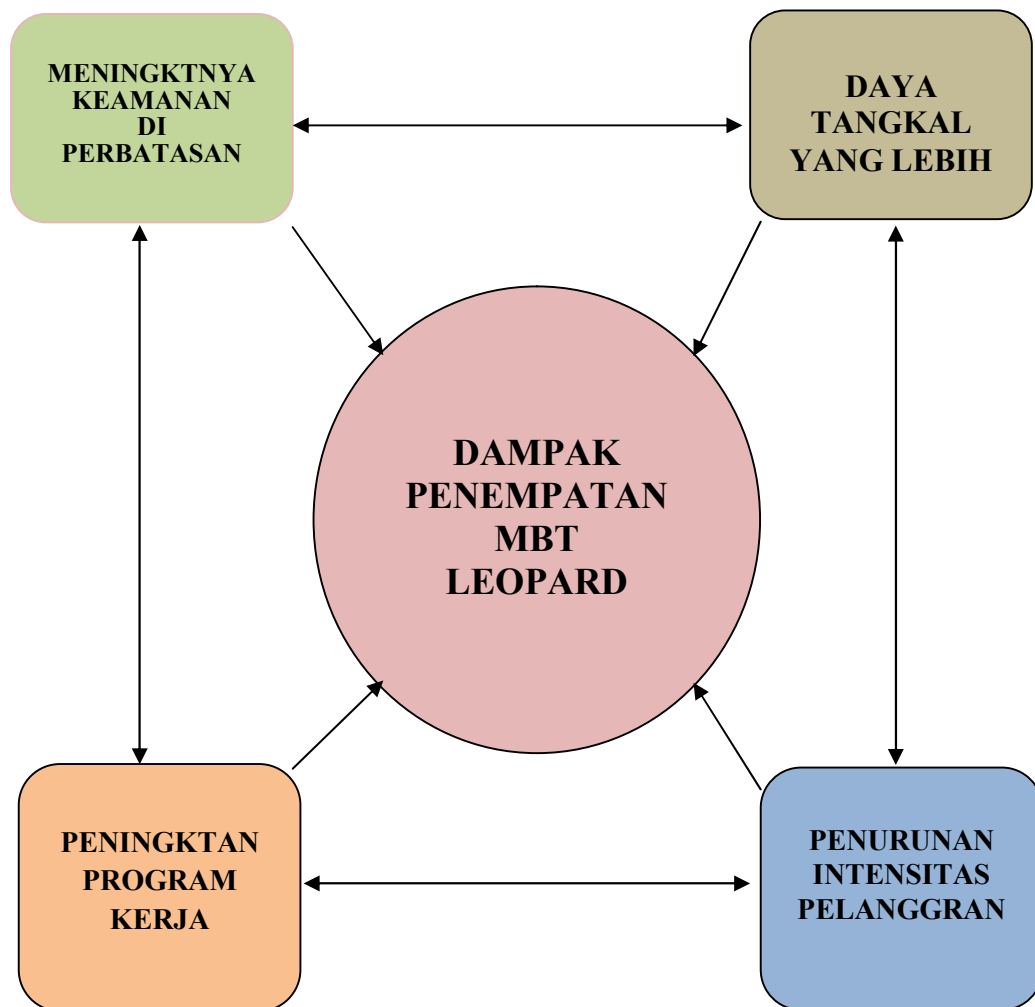
Gelar kekuatan satuan kavaleri TNI AD di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat ditujukan pada peningkatan kemampuan dan kekuatan yang mampu mengkover seluruh wilayah tanggung jawab Kodam XII/Tpr. Kodam sebagai kompartemen strategis harus memiliki daya tangkal yang kuat dengan meningkatkan kemampuan, kekuatan dan gelar satuan sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang mungkin timbul. Dari persyaratan gelar kekuatan tersebut, maka penggelaran kekuatan satuan kavaleri TNI AD, di lakukan bukan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, harus di dukung oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat di daerah setempat dan ditujukan untuk keberhasilan atau kemajuan tugas Kodam XII/Tpr itu sendiri.

Pada Undang-Undang RI No. 34/2004 tentang TNI pasal 11 ayat 1 berbunyi: "Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata." Dan ayat 2 berbunyi: "Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara." Pada penjelasan pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. Pembangunan dan penggelaran kekuatan satuan kavaleri TNI AD tersebut harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan. Dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan satuan kavaleri TNI AD, harus di hindari bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.

Kekuatan satuan kavaleri TNI AD yang telah disusun harus ditentukan penempatannya untuk memberikan manfaat maksimal bagi pertahanan Kodam XII/Tpr. Gelar kekuatan satuan kavaleri TNI AD tidak selalu mengikuti gelar struktur organisasi administrasi pemerintahan, tetapi disesuaikan dengan perkiraan kemungkinan timbulnya ancaman, sehingga gelar kekuatan satuan kavaleri TNI AD disusun sedemikian rupa agar mampu merespon dengan cepat setiap ancaman yang terjadi di seluruh wilayah Kodam XII/Tpr. Gelar kekuatan satuan kavaleri TNI-AD didasarkan pada konsep pertahanan Kodam XII/Tpr sebagai kompartemen strategis pertahanan matra darat melalui strategi pertahanan negara di darat menggunakan operasi perlawanan wilayah yang pada akhirnya menggunakan atau menerapkan konsep strategi perang berlarut di wilayah pertahanan. Gelar kekuatan satuan kavaleri TNI-AD diarahkan pada terwujudnya totalitas efek tangkal dan tersedianya kekuatan penangkal awal terhadap setiap ancaman yang diprediksi.

Dampak gelar satuan Kavaleri khususnya MBT Leopard di perbatasan Indonesia-Malaysia terutama di Provinsi Kalimantan Barat dapat di visualisasikan sebai berikut:



Gambar 4.13 : Visualisasi Dampak Gelar

Berdasarkan empat substansi sebagai indikator dari dampak gelar satuan Kavaleri TNI AD dengan MBT Leopard sebagai Alutsistanya di perbatasan darat Indonesia-Malaysia, maka dapat di susun proposisi sebagai berikut: "Dampak Gelar kekuatan satuan Kavaleri TNI AD dan MBT Leopard akan berpengaruh pada meningkatnya keamanan wilayah, mempunyai daya tangkal yang lebih, mensukseskan program-program Kodam XII/Tpr dan menurunkan intensitas pelanggaran".

.Keberadaan MBT Leopard sangat penting, selain untuk menghadapi penerobosan Alut Sista sejenis ke teritori kita, juga sebagai *deterrence* dan *sivis pacem parra bellum*. *Deterrence* sangat

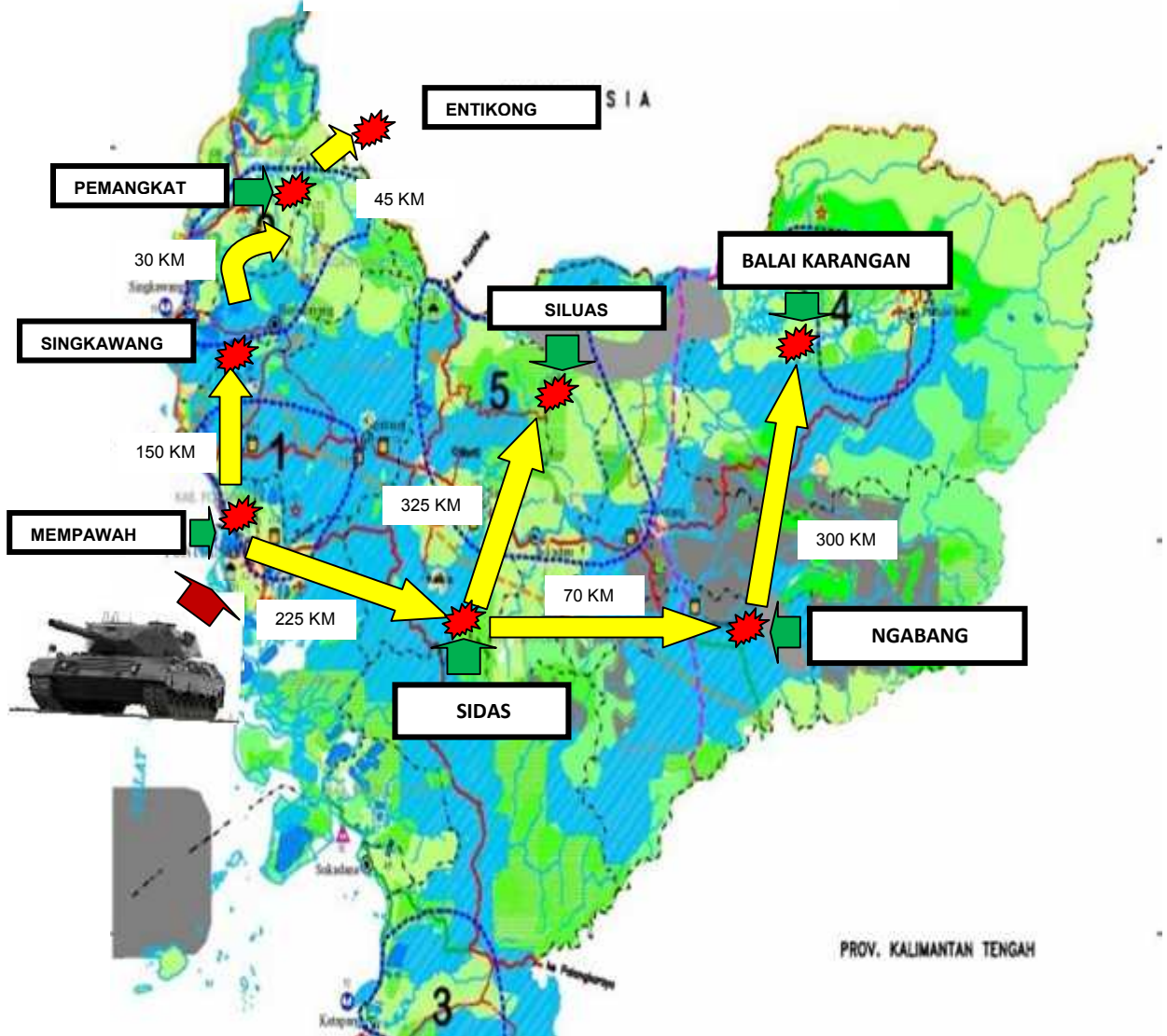
penting, selain itu negara tetangga telah memiliki Alut Sista serupa. Indonesia berbatasan darat langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Apabila dilihat dari unsur “Cuaca, Medan dan Musuh” (cu-me-mu) atau dengan kata lain pertimbangan geografis, ke 3 locus di garis perbatasan tersebut, cocok untuk ditempatkan tank-tank tersebut. Namun apabila dilihat dari keterbatasan pengadaan MBT, maka mengerucut pada satu locus, yaitu di Pulau Kalimantan.

Penentuan dislokasi Batalyon Kavaleri 12 di Mempawah Kalimantan Barat sudah dapat mengkover seluruh wilayah tanggung jawab Kodam XII/Tpr. Diharapkan keberadaan Batalyon Kavaleri 12 di Mempawah Kalimantan Barat dapat memberikan kedalaman dalam pertahanan yang disesuaikan dengan rencana pola gelar Satpur dan Satbanpur di wilayah Kalimantan Barat. Dislokasi Batalyon Kavaleri 12 di Kab. Mempawah Kalimantan Barat dengan luas lahan yang telah disiapkan ±55 Ha dari Pemda akan sangat membantu tugas pokok Kodam XII/TprTpr didalam menghadapi setiap ancaman yang timbul di wilayah Kalimantan Barat, terutama dalam penyiapan Satbanpur yang siap digerakkan. Kriteria pemilihan lahan dislokasi Batalyon Kavaleri 12 telah memenuhi syarat antara lain : Terdapat sumber air, Terdapat jaring jalan, Dekat fasilitas kesehatan (Rumah Sakit), Dekat dengan pasar, Dekat sarana pendidikan dan Cukup luas untuk penempatan Pangkalan dan medan latihan untuk manover Ranpur. Kendaraan Tempur yang cocok dan memenuhi kebutuhan mobilitas serta memiliki daya tangkal yang efektif adalah Kendaraan Tempur MBT Leopard.

Gambar 4.11 Dislokasi Yonkav 12 di Mempawah Kalimantan Barat



Gambar 4.12 Route Yonkav 12 Menuju





Gambar 4.12 Pembangunan Yonkav 12 yang sudah 50 %

Menurut Andy Widjanto (2012: 123), Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Propinsi Kaimantan Barat itu memang membutuhkan pertahanan yang “pantas” dan seimbang dengan tetangganya. Dahulu kita mengharapkan kalau BNPP sudah ada maka hal itu akan tertangani dengan baik. Tetapi nyatanya apa? Mereka malah hanya mengeluarkan konsep pembangunan jalan inspeksi di sepanjang perbatasan, jalan yang didesain hanya untuk sebatas sepeda motor; suatu konsep yang sangat “ menusuk” rasa dan semangat pertahanan suatu bangsa. Mengapa mereka tidak

berpikir sebagaimana seharusnya suatu bangsa menggelar kekuatannya, di wilayah perbatasan? Wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat harus didukung oleh infrastruktur yang sesuai bagi pertahanan darat, khususnya jalan darat yang sesuai dengan spesifikasi keperluan Tank jenis Leopard. Persoalannya apakah hal-hal seperti itu sudah terpikirkan?

Dari hasil wawancara dengan Gubernur Kalimantan Barat dan wawancara dengan wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan TNI dalam penyiapan infra struktur selama ini sudah berjalan, namun dirasakan belum optimal. Pemerintah Daerah dengan RTRW Pembangunannya, hanya mengedepankan aspek kesejahteraan rakyat. Sementara TNI dengan konsep RUTR Pertahan hanya mengedepankan aspek pertahanan dan keamanan saja. Dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah Propinsi Kalimantan Barat perlu adanya upaya sinkronisasi RUTR pertahanan yang disusun oleh TNI dengan RTRW pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat memerlukan keterpaduan antara pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dengan pembangunan yang berorientasi pada pertahanan. Oleh karena itu, antara Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dengan Komando kewilayahan (Kodam XII/Tpr) selalu merencanakan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Batrarat dengan memadukan antara aspek pertahanan dan kesejahteraan sehingga dapat menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Perlunya koordinasi antara Komando Kewilayahan (Kodam XII/Tpr) dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam menyusun RTRW Pembangunan dan RUTR Pertahanan sehingga tercipta sinergi pembangunan wilayah perbatasan yang memperhatikan aspek

kesejahteraan dan keamanan. Setiap proses penyusunan RTRW dan RUTR harus melibatkan antara jajaran Pemda dan DPRD yang menyertakan satuan TNI, seperti Kodam, Korem, dan Kodim sehingga akan tercapai pembangunan nasional yang mencakup aspek kesejahteraan dan keamanan. Membantu Pemda dalam membangun infrastruktur dan sarana prasarana guna menunjang akses ke wilayah perbatasan dalam rangka membangun wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Sebagai contoh: TNI AD bersama sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah membangun sarana prasarana dan infrastruktur di wilayah perbatasan sehingga sangat bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang telah dicanangkan sebelumnya melalui border development center (BDC).

Demikian juga, pembangunan jalan di sepanjang garis perbatasan antara Perbatasan Kalimantan Barat dengan Negara Bagian Serawak yang dilakukan secara bertahap telah mendukung lancarnya transportasi untuk keperluan aktivitas perekonomian masyarakat perbatasan. Pembangunan jalan ini dikerjakan atas prakarsa pemerintah yang menggandeng TNI melalui operasi TMMD.

Disamping itu, perluasan ketersediaan sarana dan prasarana/ infrastruktur dasar wilayah, transportasi dan telekomunikasi bagi masyarakat perbatasan Kalimantan Barat juga dilakukan, seperti pendirian stasiun relay Telkom, PDAM, pembangunan jembatan, pembangunan gedung perkantoran dan berbagai fasilitas fisik lainnya sehingga akan mempermudah akses ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Pembangunan sarana prasarana kesehatan seperti Posyandu, gedung Puskesmas, Puskesmasdes, dan RSUD lainnya sangat penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan sarana pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan bermain, dan berbagai fasilitas

pendukung proses belajar mengajar juga dilakukan secara bertahap sehingga akan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Bentuk kerja sama tersebut, kedepan lebih ditingkatkan lagi terutama pada penyiapan infra struktur dan sarana prasarana yang memenuhi spesifikasi Ranpur MBT Leopard. Hal ini sangat penting, mengingat negara tetangga kita Malaysia sudah berbuat hal yang serupa di sepanjang perbatasan. Paling tidak poros jalan utama menuju perbatasan dengan negara Bagian Serawak menjadi prioritas utama. Dengan dibangunnya ruas jalan tersebut, selain meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat juga memiliki arti yang cukup signifikan bila ditinjau dari aspek pertahanan.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 4, maka simpulan penelitian adalah bahwa tinjauan gelar satuan kavaleri TNI AD di perbatasan darat Indonesia-Malaysia sebagai pendukung strategi penangkalan dalam rangka kebijakan pertahanan negara (Studi Penempatan *Main Battle Tank* Leopard), ditujukan pada peningkatan postur satuan kavaleri TNI AD, terdiri dari: kekuatan, kemampuan dan gelar satuan kavaleri yang dapat mendukung tugas pokok Kodam XII/Tpr sebagai kompartemen strategis yang memiliki daya tangkal yang kuat. Di samping itu perlu adanya koordinasi dalam penyusunan RTRW Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dengan RUTR Wilayah Pertahanan di Kalimantan Barat. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergitas pencapaian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sistim Pertahanan Negara di daerah.

a. Postur Satuan Kavaleri TNI AD.

- 1) Kekuatan satuan kavaleri TNI AD di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat melibatkan kekuatan pertahanan militer secara total dalam bentuk

kekuatan penangkalan dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh. .Bila dihadapkan dengan Malaysia yang sudah diperkuat dengan Tank PT 91 Twardy buatan Polandia dengan kekuatan 1 Batalyon, maka kekuatan satuan kavaleri yang ada saat ini yaitu 1 Detasemen dilengkapi dengan Ranpur yang usianya relatif sudah tua, tidak optimal dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam XII/Tpr. Berdasarkan analisis dan teori yang ada maka perlu adanya penambahan kekuatan satuan kavaleri yang ada dengan kekuatan minimal 1 Batalyon Kavaleri.

2) Kemampuan satuan kavaleri TNI AD yang dibutuhkan di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat adalah satuan kavaleri yang memiliki kemampuan yang handal, tangguh dan moderen. Kemampuan tersebut diperlukan untuk menciptakan efek tangkal di darat yang merupakan sinergitas antara pertahanan militer dengan kemampuan pertahanan nirmiliter baik dalam rangka tugas OMP maupun OMSP. Keberadaan MBT sangat penting, selain untuk menghadapi penerobosan Alut Sista sejenis ke teritori kita, juga sebagai *deterrence* dan *sivis pacem parra bellum*. *Deterrence* sangat penting, selain itu negara tetangga telah memiliki Alut Sista serupa. Penggunaan Ranpur kelas berat (MBT) Leopard dengan aplikasi teknologi terkini akan berdampak padapeningkatan sumber daya manusia prajurit TNI AD, sehingga diperlukan penguasaan dan pemahaman aplikasi teknologi militer oleh prajurit kavaleri TNI AD.

3) Gelar kekuatan satuan kavaleri TNI AD di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat ditujukan pada

peningkatan kemampuan dan kekuatan yang dapat dimobilisasi ke seluruh wilayah tanggung jawab Kodam XII/Tpr sebagai kompartemen strategis. Gelar kekuatan satuan kavaleri TNI AD tersebut harus memiliki daya tangkal yang kuat sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang mungkin timbul. Penentuan dislokasi Yonkav 12 di Mempawah Kalimantan Barat dapat memberikan kedalaman dalam pertahanan yang disesuaikan Kodam XII/Tpr. Dampak Gelar MBT Leopard tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya keamanan wilayah, mempunyai daya tangkal yang lebih, serta penurunan intensitas pelanggaran lintas batas.

b. Sinkronisasi antara RTRW Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan RUTR Wilayah Pertahanan yang disusun oleh TNI. Perlunya koordinasi antara Komando Kewilayahan (Kodam XII/Tpr) dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam menyusun RTRW Pembangunan dan RUTR Pertahanan sehingga tercipta sinergitas pembangunan wilayah perbatasan yang memperhatikan aspek kesejahteraan dan keamanan.

5.2 Saran.

a. Perlu penyiapan postur Kavaleri TNI AD di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dalam rangka kesiapan dan daya efek tangkal yang optimal, berupa MBT Leopard yang memiliki kekuatan, kemampuan dan gelar yang dapat mengimbangi kekuatan satuan kavaleri Malaysia di perbatasan.

b Perlu koordinasi antara Satuan Komando Kewilayahan dengan Pemerintah Daerah dalam menyusun RTRW Pembangunan dan RUTR Pertahanan sehingga tercipta sinergi pembangunan wilayah perbatasan yang memperhatikan aspek kesejahteraan, keamanan dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagyo, Hary.1996. *Perang Abad-21 dan Sishankamrata (Sistem Pertahanan Rakyat Semesta)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman(YKPBS)
- Bhakti, Ardiwirastra Yudha. 1991.*Kedaulatan Negara di Forum Peradilan*. Jakarta
- Britton, Peter. 1996. *Profesionalisme dan Ideologi Militer*. PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Budiharjo, Eko.*Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*.Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Clausewitz, Carl. 1950.*On War – 1832*. Diterjemahkan dalam Bahasa Jerman oleh O.J. Matthijs Jolles, Washington D.C. : Infantry Journal Press
- Clausewitz, Howard Michael.1991. *Maha Guru Strategi Perang modern*, Seri Empu Dunia. Jakarta : PT Grafiti Pers
- Daldjoeni, N. 1991.*Dasar-Dasar Geografi Politik*. PT. Citra Adtya Bhakti
- Departemen Pertahanan. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta

- Diamond, Larry, & Marc F. Platner. 2001. *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Rajawali Perss
- Dittopad. Maret 2005. *Titik-Titik Koordinat Batas Wilayah Darat RII-Malaysia di Kalimantan dan Permasalahannya*.
- Hamid, Rusnawir. 2011. *Carut Marut Pembangunan Perbatasan (Kalimntan Barat – Serawak)*
- Nur, Turiman Fatchurrahman. 2011. *Strategi Pengembangan Perbatasan Kedaulatan NKRI dari Berbagai Dimensi*
- Sanapiah, Faisal. 2008. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Roberts, Adam. 1986. *Nations In Armas, The Theory and Practice Of Territorial Defence*. New York : St. Martin's Perss
- Robert. Greene. 2007. *33 Strategi Perang (The 33 Strategies Of War)*, Karisma Publisihing Group
- Habib, Hasnan. 1997. *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta : CSIS
- Hermawan, Yulius P. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*.
- Lemhanas: *Tolok Ukur Kondisi Ketahanan Nasional*. 1989. Jakarta : PT Aries Lima.
- Maniruzzaman, Talukder. 1999. *Militer Kembali Kebarak, Sebuah Studi Komparatif*. Jakarta : Tiara Wacana
- Morgenthau, Hans J. 1990. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Nugroho, Riant. 2009. *Publik Policy*. Jakarta : PT Elek Media Kompuntindo Kelompok Gramedia
- Prabowo, JS. 2012. *Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta*, Pusat Pengkajiandan Strategi Nasional (PPSN). Jakarta.
- Silalahi, Uber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Unpers Perss

Suryohadioprojo, Sayidiman.1981. *Suatu Pengantar dalam Ilmu Perang, Masalah Pertahanan Negara*. Jakarta : PT Intermas.

Suryohadioprojo, Sayidiman. 2005 *Membangun Pertahanan Negara yang Moderendan Efektif*. Jakartan : PT Gramedia Pustaka Utama

Suwondo, Purbo S. 1999. *Kumpulan Butir-Butir Strategi Andre Beufre*.Jakarta : Universitas Indonesia

Sumber Elektronik

Andjioe, Mickael. 2001.*Pengelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*.[http: //www.perbatasan.com](http://www.perbatasan.com)

Sumber Lain :

Departemen Pertahanan, *Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta (2007)

Departemen Pertahanan, *Postur Pertahanan Negara*, Jakarta (2008)

Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang *Permasalahan Pertahanan dan Keamanan di Daerah Perbatasan sebuah telaahan kritis*,November 2003.

Keputusan Kasad, Nomor Kep/36/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang *Postur TNI AD Tahun 2005-2024*, Jakarta 2006.

Keputusan Panglima TNI, Nomor Kep/2/1/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang *Doktrin Tentara Nasional Indonesia*, Tri Darma, Eka Darma (Tridek), Jakarta 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (2002), *Sistem Pertahanan Keamanan Negara*.219,220.

Undang-Undang Republik Indonesia No.34 (2004), *Tentara Nasional Indonesia*.219,220.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dirbinlitbang Pussenkav TNI AD Kol Kav Dwi Haryoko



Wawancara dengan Dirbindiklat Pussenkav TNI AD Kol Kav Hatta Ruka



Wawancara dengan Dirbinsen Pussenkav TNI AD di wakili oleh Mayor Kav Yudhi P



Wawancara dengan Asrendam XII/Tpr Kol Kav Erwin Djatniko



Wawancara dengan Dandeninteldam XII/Tpr Letkol Inf Edy Wijayanto



Wawancara dengan Dandim Mempawah Letkol Kav Bambang SHT



Madenkav 2/Pontianak



Alut Sistkav Denkav 2/Pontianak



Alut Sistkav Denkav 2/Pontianak



Rencana Pangkalan Baru Yonkav di Mempawah



Rencana Pangkalan Baru Yonkav di Mempawah



Rencana Pangkalan Baru Yonkav di Mempawah



Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD TK I Kalimantan Barat